

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
OLEH DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau*



SELVINA RIANTI

NPM : 177110056

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan saya kesehatan dan kenikmatan. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Alamin, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang penulis beri judul : **“Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru”** yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Usulan Penelitian ini.

Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada

- penulis dalam menuntut ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fisipol Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang memberikan kesempatan pada penulis dalam membina ilmu pada fakultas yang beliau pimpin.
 3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memfasilitasi serta membagi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan Usulan Penelitian ini.
 4. Ibu Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan fikirannya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini.
 6. Seluruh Karyawan Tata Usaha beserta Staff yang telah membantu dalam surat-menyurat dalam penulisan dan penyusunan Usulan Penelitian ini.
 7. Teristimewa Ibunda tercinta Saliana, S.Pd. dan keluarga besar saya yang telah berjasa bersusah payah membesarkan, membina, menyekolahkan, memotivasi, dan memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis.

8. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Haris Nasution yang mana selalu memberikan dukungan, menasehati, dan mendoakan saya agar bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
9. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya Mia Febriani, Nur Syafika Maisyarah, Yesi Afriani, Mita Handayani, Nurhidayati, Rovi Octavia, Sinta yang senantiasa memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab dalam skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Namun dalam menyusun dan menulis skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan.

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terima kasih pada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga dorongan dan semangat yang diberikan dapat dibalas oleh Allah Swt Aamiin.

Pekanbaru, 7 Oktober 2021
Penulis

Selvina Rianti

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	17
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Konsep Administrasi.....	14
2. Konsep Organisasi.....	20
3. Konsep Manajemen.....	22
4. Konsep Kebijakan Publik.....	25
5. Konsep Implementasi Kebijakan.....	27
6. Konsep Pembinaan.....	30
7. Konsep Gelandangan dan Pengemis.....	34
B. Kerangka Pikir.....	36
C. Konsep Operasional.....	37
D. Operasional Variabel.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe Penelitian.....	40

B. Lokasi Penelitian	40
C. Informan dan Key Informan Penelitian	41
D. Teknik Penarikan Informan.....	42
E. Jenis dan Sumber Data.....	42
1. Data Primer	42
2. Data Sekunder	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data	44
H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	45
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	46
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	48
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	48
1. Letak Geografis Kota Pekanbaru.....	48
2. Sejarah Kota Pekanbaru	49
3. Visi Misi Kota Pekanbaru	53
B. Gambaran Umum Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru	54
C. Visi dan Misi Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru	58
D. Struktur Organisasi Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru	60
E. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	61
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Identitas Responden.....	87
B. Analisis dan Pembahasan Penelitian Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru	89
1. Komunikasi	90
2. Sumber Daya	98
3. Disposisi.....	104
4. Struktur Birokrasi	110
C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru	115
BAB VI PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	122

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Data Rekapitulasi Jumlah Gelandangan Dan Pengemis Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019.....	4
I.2 Rumusan Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru	7
I.3 Data Jumlah Gelandangan dan Pengemis Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	12
I.4 Data Jumlah Gelandangan dan Pengemis Kota Pekanbaru Berdasarkan Usia Per Tahun 2020	13
I.5 Data Pembinaan yang Telah dilakukan Kepada Gelandangan dan pengemis Kota Pekanbaru 2020.....	13
II.1 Operasional Variabel Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	39
III.1 Informan Dan Key Informan Penelitian Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru	41
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru	45
V.1 Identitas Key Informan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru	87
V.2 Identitas Informan Masyarakat Sekitar Gelandangan dan Pengemis	88
V.3 Identitas Informan Gelandangan dan Pengemis	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru	36
II.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Dokumentasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru	123
2 Daftar Pedoman Wawancara Untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru Penelitian Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	129
3 Daftar Pedoman Wawancara Untuk Gelandangan dan Pengemis Penelitian Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	134
4 Daftar Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat Penelitian Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru	139
5 Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	143
6 Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	144
7 Surat Rekomendasi Riset Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru	145
8 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru	146
9 Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing	147
10 Surat Keterangan Jurnal Online	148
11 Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi	149
12 Sertifikat Baca Alquran	150

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Selvina Rianti
NPM : 177110056
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah.
2. Bahwa, seluruh persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwasannya ternyata melanggar butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif skripsi yang saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas secara Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 7 Oktober 2021
Pelaku Pernyataan,



Selvina Rianti

PELAKSANAAN PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Selvina Rianti

Keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru sangat mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Untuk menangani permasalahan sosial tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan yang tepat yang bertujuan dapat mengubah pola pikir, sikap, prilaku, dan keterampilan gelandangan dan pengemis agar mereka mendapat kesejahteraan sosial dan dapat melanjutkan kehidupan dalam lingkungan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melakukan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis. Penelitian ini berlokasi di Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi terkait permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dokumentasi serta mencatat dan merekam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator komunikasi yang dilakukan masih belum merata dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat, indikator sumberdaya yang dimiliki belum cukup memadai, indikator disposisi sudah cukup baik karena pelaksana sudah memahami tugas dan tanggung jawab yang diemban, dan indikator struktur birokrasi sudah baik karena adanya kerjasama yang baik antar beberapa pihak dalam proses penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembinaan Gelandangan dan Pengemis.

**IMPLEMENTATION OF MANIFESTATION OF BUMPERS AND
BEGGERS BY THE SOCIAL SERVICES AND CEMETERIES OF
PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

Selvina Rianti

The existence of homeless and beggars in Pekanbaru City is very disturbing public order and disturbing the community. To deal with these social problems, it is necessary to carry out appropriate coaching aimed at changing the mindset, attitudes, behavior, and skills of homeless people and beggars so that they receive social welfare and can continue to live in a decent environment. This study aims to find out how the implementation of guidance for homeless and beggars by the Pekanbaru City Social and Cemetery Service and to find out what factors are obstacles in providing guidance to homeless and beggars. This research is located at the Department of Social Affairs and Cemetery of Pekanbaru City. This study uses a qualitative descriptive method that aims to describe the phenomena that occur related to the problems of homeless people and beggars in Pekanbaru City. The data collection techniques used in this study were interviews, observation, documentation and note-taking and recording. The results of this study indicate that the communication indicators carried out are still not evenly distributed and comprehensive to all levels of society, the indicators of the available resources are not sufficient, the disposition indicators are good enough because the implementers already understand the duties and responsibilities carried out, and the indicators of the bureaucratic structure are good because there is good cooperation between several parties in the process of overcoming homeless and beggars in Pekanbaru City.

Keywords: Implementation, Guidance of Homeless and Beggars.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan sosial masyarakat, terutama pada wilayah kota-kota besar. Permasalahan ini perlu dihadapi dengan serius dan segera dilakukan penanggulangannya karena kemiskinan akan menjadi masalah yang paling utama dalam pembangunan sosial. Kemiskinan telah menyebabkan banyaknya penduduk tidak bisa mendapatkan dan menikmati kehidupan yang layak. Akibat dari permasalahan ini yang dibarengi dengan tingginya angka pertumbuhan jumlah penduduk sehingga menimbulkan jumlah kriminalitas dan pengangguran di perkotaan kian hari kian bertambah.

Rendahnya taraf hidup seseorang menimbulkan permasalahan baru dikalangan masyarakat yang berdampak negatif pada keberhasilan pembangunan yaitu munculnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti gelandangan dan pengemis yang dilatarbelakangi minimnya tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang hingga rendahnya kualitas kesehatan yang dimiliki seseorang. Dalam hal ini maka perlu adanya tindak lanjut pemerintah untuk berupaya lebih keras untuk meningkatkan kesejahteraan sosial karena jika permasalahan ini dibiarkan terus menerus akan menyebabkan pelanggaran norma-norma, nilai, serta tatanan agama dan budaya yang berlaku pada kelompok masyarakat.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar yang terletak di Pulau Sumatera dengan berbagai macam aktivitas seperti ekonomi, dan sosial budaya. Sama halnya dengan kota-kota lain yang sedang berkembang, Kota Pekanbaru juga ikut merasakan fenomena yang serupa seperti perkembangan pesat dengan berdirinya pusat perbelanjaan, kantor-kantor, pabrik-pabrik, sarana perhubungan, sarana hiburan dan lain sebagainya yang tak luput untuk mendorong para urban untuk merubah nasib. Bagi mereka yang memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup bukan tidak mungkin mereka mampu bertahan di kota ini.

Disisi lain dalam kehidupan masyarakat di Kota Pekanbaru terdapat celah kehidupan yang sangat memperhatikan dengan munculnya kehidupan gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di persimpangan jalan, keramaian lalu lintas yang tidak memperhatikan keselamatan dirinya. Mereka adalah cerminan kehidupan fakir miskin dan anak-anak terlantar, dikatakan fakir miskin karena mereka memang hidup dari keluarga yang sangat miskin tidak berkecukupan dan hidup menderita. Jumlah mereka cenderung bertambah dari waktu ke waktu. Permasalahan sosial ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang terjadi, mulai dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan, dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”. Dalam pasal tersebut dapat ditarik sebuah pengertian bahwa tujuan negara Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa Negara mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, namun pada kenyataannya yang ada dilapangan bahwa tidak semua orang miskin dan terlantar dipelihara oleh Negara.

Pengertian Gelandangan dan Pengemis menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial sebagai berikut Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.

Fenomena gelandangan dan pengemis telah menjadi persoalan yang sangat merusak pemandangan dan keindahan Kota Pekanbaru. Penyebab munculnya keberadaan gelandangan dan pengemis ini antara lain adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai dan kesempatan kerja yang tidak selalu sama. Keadaan ini mendorong sebagian penduduk desa untuk berpindah ke Kota dengan tujuan untuk merubah nasib, namun sayangnya mereka tidak membekalkan diri dengan pendidikan, keahlian dan keterampilan yang memadai.

Mudahnya mencari uang di Kota besar seperti Pekanbaru dan Kota besar lainnya telah menjadi daya tarik tersendiri buat pendatang dari luar daerah tanpa

membawa bekal skill dan pendidikan yang memadai untuk mengadu nasib. Ketiadaan skill yang dimiliki, serta tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan sifat kemalasan inilah sehingga akan menambah tenaga yang tidak produktif di kota. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka bekerja apa saja asalkan mendapatkan uang termasuk meminta-minta (mengemis).

Demi untuk menekan biaya pengeluaran, mereka memanfaatkan kolong jembatan, emperan toko, pemukiman kumuh dan lain sebagainya untuk beristirahat, mereka tinggal tanpa memperdulikan norma sosial.

Tabel I.1 Data Rekapitulasi Jumlah Gelandangan dan Pengemis Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2019

Tahun	Jenis PMKS		Jumlah
	Gelandangan	Pengemis	
2017	95 Orang	58 Orang	153 Orang
2018	65 Orang	35 Orang	100 Orang
2019	7 Orang	55 Orang	62 Orang
Total			315 Orang

Sumber data: Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dalam rentang waktu 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 berjumlah 153 orang, tahun 2018 berjumlah 100 orang, dan tahun 2019 berjumlah 62 orang. Kemudian diperoleh rekapitulasi jumlah gelandangan dan pengemis dalam rentang waktu tiga tahun terakhir yaitu berjumlah 315 orang.

Gelandangan dan pengemis memiliki watak tidak produktif, enggan berubah dan merasa nyaman dalam kemiskinan karena mereka dengan mudah

menghasilkan uang dari meminta-minta dijalanan. Dengan mengharapkan simpati dan mengharapkan rasa iba mereka gampang mendapatkan uang.

Dari sudut pandang, hal ini dapat dilihat dari faktor kemiskinan dan kebodohan sekeras apapun mereka berusaha uang yang di dapat hanya segitu saja dan tetap saja miskin. Mereka bukan tidak bekerja keras tetapi karena tidak berdaya untuk mengubah nasib sehingga mengemis merupakan pilihan hidup dari pada tidak menghasilkan apa-apa demi menghidupi keluarga.

Untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatasi dan menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis di kotanya. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan merumuskan kebijakan untuk menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis dengan membuat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru.

Adapun tujuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial adalah untuk meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kesejahteraan sosial. Sasaran dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 ini adalah terwujudnya ketentraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku dimana pemerintah dan masyarakat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Pasal 3 berbunyi :

1. Dilarang melakukan pengemis di depan umum dan di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.
2. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum.
3. Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian ditempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.

Yang menjadi pelaksana pembinaan gelandangan di Kota Pekanbaru dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru dalam Pasal 8 ayat (4) : “Tindak lanjut razia pada ayat (1) dan ayat (2) di koordinasikan dengan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik pemerintah Daerah dan/atau panti swasta dan/ atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar kota Pekanbaru”. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai rencana kerja sebagai berikut:

Tabel I.2 Rumusan Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Sosial Dan Pemukiman Kota Pekanbaru Tahun 2020

Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2020		
		Lokasi	Target	Dana
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Gelandangan Pengemis	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Gelandangan Pengemis	Dinas Sosial	4 laporan	2.019.621.647
Penyediaan Permakanan	Laporan penyediaan Permakanan penyandang disabilitas terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis	Dinas Sosial	4 laporan	239.800.000
Penyediaan sandang	Laporan penyediaan sandang penyandang disabilitas terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis	Dinas Sosial	4 laporan	224.720.000
Penyediaan Alat Bantu	Laporan penyediaan alat bantu penyandang disabilitas terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis	Dinas Sosial	4 laporan	83.139.700
Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Laporan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak jalanan, lanjut usia	Dinas Sosial	4 laporan	39.919.952

	terlantar, serta gelandangan pengemis			
Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Laporan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial penyandang disabilitas terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis	Dinas Sosial	4 laporan	210.000.150
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Laporan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Dinas Sosial	4 laporan	108.375.058
Fasilitas pembuatan Nik, Akta Kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak.	Laporan fasilitas pembuatan Nik, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak penyandang disabilitas terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis	Dinas Sosial	4 laporan	49.999.513
Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Laporan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, serta gelandangan	Dinas Sosial	4 laporan	49.999.738

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

	pengemis			
Pemberian layanan data dan pengaduan	Laporan pemberian layanan data dan pengaduan penyandang disabilitas terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis	Dinas Sosial	4 laporan	780.711.082
Pemberian layanan kedaruratan	Laporan pemberian layanan kedaruratan penyandang disabilitas terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis	Dinas Sosial	4 laporan	131.053.534
Pemberian layanan penelusuran keluarga	Laporan pemberian layanan penelusuran keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis	Dinas Sosial	4 laporan	49.999.920
Pemberian layanan rujukan	Laporan pemberian layanan rujukan penyandang disabilitas terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis	Dinas Sosial	4 laporan	51.903.000

Sumber data: *Rencana Kerja Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tahun 2020*

Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan gelandangan yang sudah ada sebelumnya antara lain; UU Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Pasal 2 “Penanggulangan gelandangan dan

pengemis yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemis didalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia”.

Tugas Seksi Rehabilitas Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis tertuang dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Pasal 29 poin (g) merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, konsultasi teknis dan rehabilitas sosial penyandang tuna sosial (eks WTS, gelandangan dan pengemis, gelandangan psikotik, bekas napi, kaum minoritas), korban tindak kekerasan, pekerja migran dan perdagangan orang serta ODHA.

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis diluar panti yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota Pasal 34 Ayat (1), berupa:

- a. Permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;

- b. Sandang;
- c. Alat bantu;
- d. Perbekalan kesehatan;
- e. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
- f. Bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
- g. Fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
- h. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- i. Penelusuran keluarga;
- j. Reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
- k. Rujukan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis adalah:

1. Usaha preventif / menekan / meniadakan, suatu upaya yang bertujuan untuk menghambat dan/atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah kesejahteraan sosial terutama masalah gelandangan dan pengemis melalui pemasangan baliho, brosur, leaflet, dan sosialisasi
2. Usaha represif atau pencegahan, yaitu upaya yang sudah terorganisir dengan tujuan untuk meniadakan gelandangan dan pengemis serta

mencegah meluasnya keberadaan gelandangan dan pengemis didalam masyarakat dengan cara penertiban, razia, penyuluhan, koordinasi, dan tim yustisi.

3. Usaha rehabilitas
 - a. Rehabilitas sosial dalam panti
 - 1) Pengiriman ke panti anak
 - 2) Panti disabilitas
 - b. Rehabilitas sosial luar panti
 - 1) Pelatihan keterampilan
 - c. Rehabilitas sosial berbasis masyarakat
 - 1) Perlindungan melalui keluarga, dan
 - 2) Masyarakat sekitar

Tabel I.3 Data jumlah Gelandangan dan Pengemis Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Jenis PMKS	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Gelandangan	10 Orang	7 Orang	17 Orang
2	Pengemis	16 Orang	31 Orang	47 Orang
Total				64 Orang

Sumber data: Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah gelandangan dan pengemis yang terdapat di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin dengan total jumlah 64 orang, dengan rincian jumlah jenis kelamin laki-laki berjumlah 26 orang dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 38 orang.

Tabel I.4 Data Jumlah Gelandangan dan Pengemis Kota Pekanbaru Berdasarkan Usia Per Tahun 2020

No	Usia	Jenis PMKS	
		Gelandangan	Pengemis
1	1 – 10 Tahun	-	11 Orang
2	11 – 20 Tahun	2 Orang	10 Orang
3	21 – 30 Tahun	2 Orang	6 Orang
4	31 – 40 Tahun	7 Orang	6 Orang
5	41 – 50 Tahun	1 Orang	4 Orang
6	51 – 60 Tahun	1 Orang	3 Orang
7	61 – 75 Tahun	4 Orang	6 Orang
Jumlah		17 Orang	47 Orang
Total		64 Orang	

Sumber data: Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat diketahui bahwa jumlah gelandangan dan pengemis yang terdapat di Kota Pekanbaru diketahui paling banyak dalam rentang usia 1 tahun hingga 20 tahun yang artinya gelandangan dan pengemis tersebut masih tergolong masa anak-anak dan dalam usia remaja.

Tabel I.5 Data Pembinaan yang telah dilakukan kepada Gelandangan dan Pengemis Kota Pekanbaru Tahun 2020

Indikator	Jenis Pembinaan
Tindakan Rehabilitasi	Pengiriman ke panti milik daerah
	Pengiriman ke panti disabilitas
	Pelatihan Keterampilan Sol sepatu, dan olah pangan kerajinan.
	Penyediaan makanan, daycare, dan homecare
	Pembinaan Mental pemulihan harga diri dan tanggung jawab sosial
	Membangun kemampuan dan kemauan gepeng menjalankan fungsi sosialnya secara wajar

Sumber data: Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tahun 2021

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis sesuai dengan tupoksi nya yaitu melakukan pembinaan dan merumuskan kegiatan pembinaan dibidang rehabilitas sosial bagi penyandang cacat, anak bermasalah, tuna sosial dan daerah kumuh. Tuna sosial yang dimaksud diatas adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, dan hukum serta cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna sosial, dsb.

Namun hingga saat ini pembinaan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Kota Pekanbaru sampai saat ini dinilai belum optimal. Berbagai Fenomena yang ada adalah :

1. Pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal karena masih belum terasanya dampak pembinaan dan pelatihan terhadap gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menekan jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Masih terdapat beberapa gelandangan dan pengemis yang sudah terjaring razia yang kemudian diberikan pembinaan dan pelatihan namun mereka kembali melakukan aktivitas menggelandang dan mengemis seperti biasa yang dilakukan di persimpangan lampu merah, kolong flyover, jembatan penyebrangan orang, pasar tradisional dan juga rumah-rumah makan atau restoran.

Berdasarkan dari aturan-aturan yang berlaku, penulis beranggapan masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di persimpangan jalan, jembatan penyebrangan, emperan toko dan juga rumah-rumah makan meskipun telah adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penetapan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui aspek apa saja yang menjadi factor penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Social Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian terhadap Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Kota Pekanbaru adalah:

- a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik
- b. Kegunaan praktis yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis Kota Pekanbaru
- c. Kegunaan akademis sebagai bahan perbandingan dan referensi penelitian bagi kalangan akademis yang meneliti hal yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis mengutip beberapa pendapat para ahli dan teori yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk memudahkan penelitian untuk memecah permasalahan yang terjadi dan akan menjadi landasan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

1. Konsep Administrasi

Kata administrasi berasal dari bahasa latin “administrare” yang berarti *to manage*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) administrasi diartikan sebagai:

- a. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan organisasi
- b. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan serta mencapai tujuan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
- d. Kegiatan kantor dan tata usaha.

Siagian (dalam Pasalong, 2016;3) mendefinisikan Administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Gulick berpendapat bahwa Administrasi adalah suatu system pengetahuan dimana olehnya manusia dapat mengerti hubungan-hubungan meramalkan akibat-

akibat dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan dimana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk tujuan bersama (dalam Syafiie, 2018;4)

Administrasi menurut Irawan (2017;25-27) dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:

1. Administrasi dalam arti sempit yaitu dimaknai sebagai kegiatan “*tulis-menulis,*” “*catat-mencatat,*” “*mengetik,*” “*surat-menyurat (correspondence)*”, yaitu suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman informasi secara tertulis dimulai dari penyusunan, penulisan hingga pengiriman informasi dan sampai kepada pihak yang telah dituju.
2. Administrasi dalam arti luas adalah sebagai proses kerja sama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Pasalong (2016;3) berpendapat Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional.

Selanjutnya Pasalong (2016;3) memahami bahwa administrasi mempunyai dua dimensi, yaitu (1) dimensi karakteristik, dan (2) dimensi unsur-unsur yang melekat pada administrasi.

Dimensi karakteristik administrasi terdiri atas:

1. Efisien, berarti bahwa tujuan (*motive*) dari pada administrasi adalah untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien
2. Efektifitas, pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat.
3. Rasional, berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat untuk maksud yang berguna, tetapi tentu saja yang dilakukan dengan sadar atau disengaja.

Dimensi unsur-unsur administrasi terdiri atas:

1. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan

2. Adanya kerja sama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
3. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai

Syafiie (2018;7) Administrasi disebut sebagai suatu seni karena dalam administrasi juga dikenal berbagai cipta, rasa, dan karsa seorang administrator, administrasi memiliki seni merencanakan, seni membiayai, seni mengatur, seni mengurus, seni menyelenggarakan berbagai kegiatan baik rutin maupun insidental.

Selanjutnya Syafiie (2018;5) menjelaskan unsur-unsur pelaksanaan administrasi, yaitu:

1. Pengorganisasian
2. Manajemen
3. Tata hubungan
4. Keuangan
5. Perbekalan
6. Tata usaha
7. Perwakilan

Tarmizi dan Hendry (2015;10) mengatakan Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Lebih lanjut Tarmizi dan Hendry (2015;10) mengatakan beberapa unsur yang menjadikan administrasi itu ada, yaitu:

1. Dua orang manusia akan lebih
2. Tujuan
3. Tugas yang hendak dilaksanakan
4. Peralatan dan perlengkapan

Menurut Hadar Nawawi (dalam Syafiie, 2018;5) berpendapat administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian bersama usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan (Wirman, 2012;12)

Menurut Siagian (dalam Tarmizi dan Hendry, 2015;14) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan.

Menurut Tarmizi dan Henry (2015;14) dari batasan makna organisasi dapat ditinjau dari dua aspek yaitu organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan, organisasi sebagai rangkaian hierarki antara orang-orang dalam suatu ikatan formal. Sebagai wadah administrasi relatif bersifat statis, sedangkan sebagai rangkaian hierarki organisasi merupakan suatu proses, dengan demikian ia bersifat lebih dinamis.

Menurut Stephen P. Robbins (dalam Irawan, 2017;38) pemahaman merupakan Robbins terhadap organisasi diartikan sebagai kesatuan sosial yang

dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut Irawan (2017;39) organisasi dipahami sebagai wadah manusia atau individu untuk melakukan kerjasama yang terintegrasikan atau terkoordinasikan, sehingga memungkinkan orang-orang yang berada didalam organisasi itu untuk mencapai tujuan bersama.

Lebih lanjut Irawan (2017;39) menjelaskan organisasi sebagai wadah yaitu merupakan suatu wahana kegiatan yang mencerminkan bahwa organisasi merupakan tempat beraktivitas saja. Didalam wahana itu kegiatan setiap orang harus jelas tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, serta hubungan juga tata kerjanya. Organisasi sebagai wadah, maka pola struktur harus kuat serta diikuti dengan pemikiran yang benar-benar berorientasi pada masa depan. Hal ini diperlukan untuk terjadi adanya perubahan tujuan atau aktivitas yang menuntut adanya perubahan mendasar dan strukturnya tidak harus berubah.

Menurut Weber bahwa: suatu organisasi atau kelompok kerja sama ini mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut (dalam Thoha, 2002;98)

1. Organisasi merupakan tata hubungan social, dalam hal ini mengandung individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasi tersebut.
2. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (*boundaries*), dengan demikian seseorang yang melakukan proses interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu
3. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan ini menyusun proses interaksi di antara orang-orang yang bekerja sama didalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.

4. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang terstruktur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu.

Menurut Hasibuan (2013;5) organisasi adalah suatu system perserikatan-perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama.

Dalam suatu organisasi minimum mengandung tiga elemen yang saling berhubungan (Siswanto, 2011;73) ketiga elemen tersebut adalah (1). Sekelompok Orang, (2). Interaksi dan kerjasama, (3). Tujuan Bersama

3. Konsep Manajemen

Menurut Donnely, et. Al (dalam Irawan, 2017;79) manajemen dipahami sebagai proses yang dilakukan oleh satu atau beberapa individu untuk mengkoordinasikan kegiatan orang lain untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai oleh satu individu bertindak sendirian.

Shafritz dan Russel mengatakan manajemen adalah berkenaan dengan orang yang bertanggungjawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumber daya seperti orang dan mesin untuk mencapai tujuan organisasi (dalam Pasalong, 2016;82)

Sedangkan Hasibuan (2016;1) berpendapat manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Stoner dan Wankel mengatakan bahwa manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya

anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (dalam Pasalong, 2016;82)

Selanjutnya menurut George R. Terry & Leslie W. Rue Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata (dalam Irawan, 2017;79)

Sedangkan Shafritz dan Russel (dalam Pasalong, 2016;82) menjelaskan manajemen adalah berkenaan dengan orang yang bertanggungjawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumber daya seperti orang dan mesin untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Irawan (2017;79) menyimpulkan manajemen adalah suatu proses kegiatan, yaitu merupakan suatu rangkaian aktivitas pengelolaan yang dilakukan terus-menerus oleh manajer dan administrator, yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan serta mengoordinasikan apa yang telah direncanakannya sampai kepada kegiatan pengawasan agar bekerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pasalong (2016;82) mengemukakan empat klaster kompetensi yang ada dalam manajemen, yaitu:

1. Klaster manajemen tujuan dan aksi yang terdiri atas orientasi efisiensi, tindakan proaktif, kepedulian terhadap dampak, dan penggunaan diagnostic terhadap konsep-konsep.
2. Klaster pengarahan terhadap bawahan yaitu penggunaan kekuasaan unilateral, pengembangan yang lain dan spontanitas.
3. Klaster manajemen sumber daya manusia yaitu penggunaan dalam melakukan sosialisasi, mengelola kelompok, persepsi positif, objektivitas persepsi, penilaian yang akurat, pengendalian diri, stamina dan kemampuan menyesuaikan diri

4. Klaster kepemimpinan yaitu mengembangkan percaya diri, konseptualisasi, pemikiran yang logis, dan penggunaan presentasi lisan.

Manajemen adalah disiplin ilmu yang multi segi: manajemen harus berurusan dengan sumber-sumber yang heterogen. Kinerjanya tergantung dari tersedianya pengetahuan dan keterampilan berbagai disiplin ilmu yang tepat. Manajemen telah tumbuh dengan menggunakan berbagai ilmu seperti sosiologi, psikologi, dan sebagainya. Karena hal tersebut kadang-kadang manajemen disebut ilmu perilaku (Wirjana, 2007;13)

Manajemen dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain (Pasalong, 2016;6)

Siagian (dalam Yussa Tarmizi & Hendry Andry, 2015;12) mendefinisikan bahwa manajemen dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi dengan perkataan lain administrasi dan manajemen tidak dapat dipisah-pisahkan, hanya kegiatan-kegiatannya yang dapat dibedakan. Dilihat dari segi fungsionalnya administrasi mempunyai dua tugas utama, yaitu:

1. Menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai (organizational.
2. Menentukan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh organisasi (general and overall policies)

4. Konsep Kebijakan Publik

Carl Fried Rich menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu (dalam Winarno, 2011;20)

Menurut Keban (2004;55) bahwa “*Public Policy* dapat dilihat sebagai konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja”. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan.
2. Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi.
3. Sebagai suatu proses, kebijakandipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan
4. Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban 2008;60) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Sedangkan menurut Suwitri dalam Suaedi dan Wardiyanto (2010;138), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia,

berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

Kebijakan public merupakan hasil interaksi intensif antara para actor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya (Agustino, 2017;1)

Kebijakan Publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2013;2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*), selanjutnya Thomas Dye mengatakan defenisi kebijakan public mengandung makna :

1. Kebijakan public tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta;
2. Kebijakan public menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah

Anderson (dalam Agustino, 2017;17) mendefenisikan kebijakan public adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

William N. Dunn mengatakan bahwa kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain (dalam Pasalong, 2016;39)

Kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk, yaitu: (1) *Regulatory*, yaitu mengatur perilaku orang, (2) *Redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu

memberikannya kepada yang miskin, (3) *Distributive* yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan (4) *Constituted*, yaitu ditujukan untuk melincungi negara (Pasalong, 2016;39-40)

5. Konsep Implementasi Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Winarno (2011;147) Implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-proram.

Agustino (2017;126) mengemukakan defenisi implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan, dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2011;149) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2017;128) mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk

undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan.

Sedangkan Grindle mengemukakan pandangannya secara umum bahwa implementasi membentuk suatu ikatan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah (dalam Winarno, 2011;149)

Riant (2012;707) mengemukakan bahwa terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan.

- a. Tepat kebijakan, ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
- b. Tepat pelaksanaannya, terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.
- c. Tepat target, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak. Dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.
- d. Tepat lingkungan, lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi diantar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Dan lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.
- e. Tepat proses, terdiri atas tiga proses. Yaitu Policy Acceptance, publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Policy adoption, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Strategic Readiness, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan.

Metter dan Horn (dalam Agustino, 2017 ;133) mencoba mengadopsi model system kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil kebijaksanaan. Terdapat 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan, kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.
2. Sumber Daya, keberhasilan proses implementasi teragntung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumber daya lain yang perlu diperhitungkan adalah sumber daya finansial dan waktu.
3. Karakteristik agen pelaksana, kinerja implementasi kebijakan (public) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana, sikap penerimaan atau pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan public.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktvitas pelaksana, semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan, maka asumsinya kesalahan akan snagat kecil terjadi.
6. Lingkungan ekonomi, social, dan politik. Lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Teori Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Subarsono, 2013;90) dipengaruhi oleh empat variable, yakni:

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan mesyaratkan agar implementor mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Sumberdaya, sumberdaya dapat berwujud:
 - a. sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, penambahan jumlah staff atau implementor saja tidak mencukupi,

tetapi diperlukan juga keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.

- b. Fasilitas juga diperlukan dalam melakukan implementasi, seperti sarana dan prasarana.
 - c. Sumber daya finansial, menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
3. Disposisi, disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
 4. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek terstruktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau SOP

Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada, yaitu:

1. Unsur pelaksana.
Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagai mana yang dijelaskan Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:28), Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.
2. Adanya Program Yang Dilaksanakan
Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.
3. Target Group Atau Kelompok Sasaran
Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

6. Konsep Pembinaan

Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan abntuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha

kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995)

Pembinaan merupakan tahapan terakhir dari proses pelayanan social dan rangkaian proses rehabilitas social atau pemulihan, yang ditujukan agar klien dapat beradaptasi dan berperan aktif dalam keluarga dan masyarakat (Widodo dkk, 2012;2)

Saydam (1996;408) berpendapat pembinaan adalah pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut Miftah Thoha (1997;30) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari defenisi pembinaan yaitu:

1. Pembinaan itu bisa serupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan
2. Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia. Hal ini sejalan dengan

pendapat Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi” mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa:

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu system pembaharuan dan perubahan (change).
3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normative, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti (Miftah, 1997;16-17)

Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih, dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi, pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai mentaati peraturan yang berlaku (Santoso, 2005;52)

Selanjutnya Santoso (2005;57) menjelaskan bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain:

1. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada masyarakat, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan kemampuan-kemampuan agar dapat membentuk sikap dan berperilaku yang seharusnya.

2. Pengarahan

Pengarah merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efesuen dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Pengarah adalah suatu proses dimana pimpinan memberi intruksi, petunjuk, dan mengawasi pelaksanaan pekerja untuk mencapai tujuan.

3. Bimbingan

Bimbingan adalah salah satu bentuk helping (bantuan) yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Dalam melakukan bimbingan harus dilakukan secara sistematis dan terarah supaya tercapai tujuan yang diinginkan.

Pembinaan yang dilakukan terus menerus diharapkan pengusaha dan pengrajin akan menjadi lebih baik dan lebih sesuai dengan budaya yang digunakan dalam organisasi, seperti bekerja keras, bekerja dengan baik, mempunyai semangat yang tinggi, memiliki mental yang kuat, mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap prestasi. Sementara itu tujuan dari pembinaan dan juga dapat dirumuskan pendidikan nasional, yang juga terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa (YME), berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, ber etos kerja, professional, bertanggung jawab dan proaktif serta sehat jasmani dan rohani (Oemar hamalik, 2000;14)

7. Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Istilah Gepeng merupakan singkatan dari dua nama yang tidak asing ditelinga kita yaitu gelandangan dan pengemis. Gelandangan berasal dari kata gelandang yang artinya selalu berkeliaran dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, serta tidak mempunyai kehidupan tertentu yang berbeda dengan kehidupan orang pada umumnya (Supardi, 1984;179).

Gelandangan dibedakan menjadi dua, yaitu gelandangan psikotik dan gelandangan non psikotik. Gelandangan psikotik didefinisikan sebagai orang yang hidup dijalan, mengalami gangguan jiwa dan terlantar. Sedangkan gelandangan non psikotik adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan keadaan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum (Iman dkk, 2009;10)

Menurut Asnawi (2003;15) pengemis dibagi menjadi dua golongan, yaitu pengemis murni dan pengemis tidak murni, pengemis murni adalah mereka yang mempunyai tempat tinggal tertentu yang penghidupan seluruhnya atas dasar meminta-minta pada waktu tertentu. Sedangkan pengemis tidak murni adalah mereka yang mempunyai tempat tinggal yang sebagian penghasilannya diperoleh dari meminta-minta pada waktu tertentu.

Menurut Effendi (1993;114) adanya gelandangan dan pengemis dikarenakan dua faktor, yaitu:

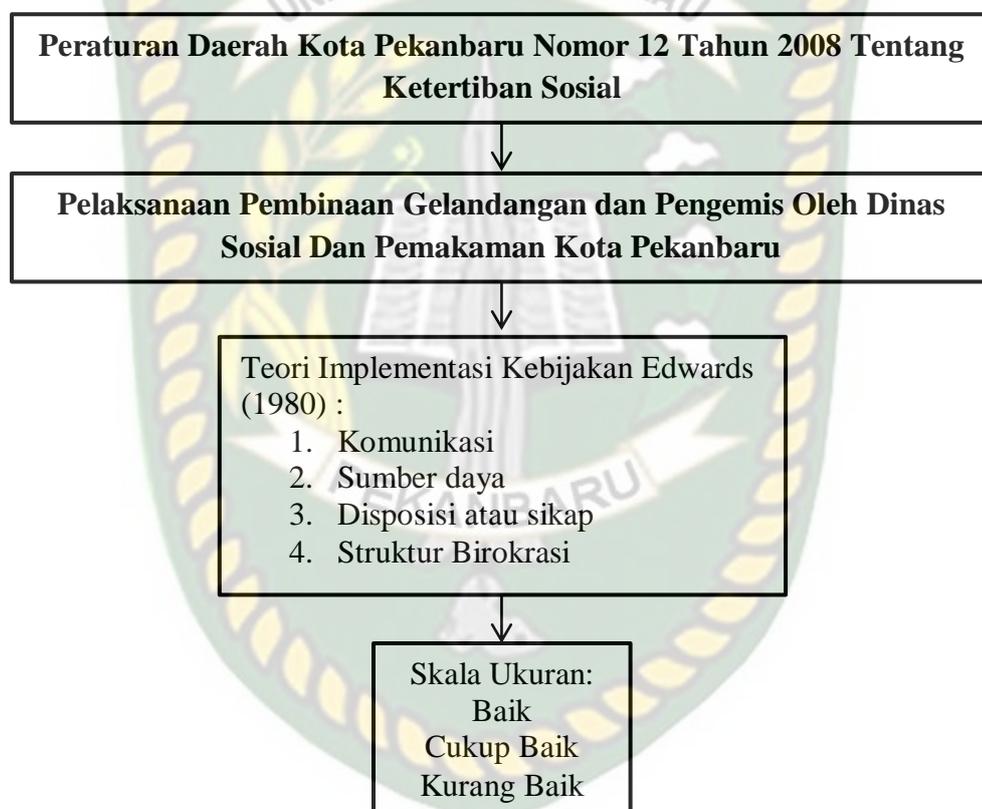
1. Faktor eksternal, antara lain: gagal dalam mendapatkan pekerjaan, terdesak oleh keadaan seperti tertimpa bencana alam dan perang, pengaruh orang lain.
2. Faktor internal, antara lain: kurangnya bekal pendidikan dan keterampilan, rasa rendah diri atau kurang percaya diri, kurang sikap untuk hidup dikota besar, sakit jiwa atau cacat tubuh.

Gelandangan dan pengemis adalah salah satu kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan, dan di sisi lain memiliki pola hidup yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Mereka hidup terkonsentrasi di sentra-sentra kumuh di perkotaan. Sebagai kelompok marginal, gelandangan dan pengemis tidak jauh dari berbagai stigma yang melekat pada masyarakat sekitarnya. Stigma ini mendeskripsikan gelandangan dan pengemis dengan citra yang negatif. Gelandangan dan pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti : kotor, sumber kriminal, tanpa norma, tidak dapat dipercaya, tidak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, malas, apatis, bahkan disebut sebagai sampah masyarakat.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapatlah dibuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini. Adapun kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat dari gambar II.

Gambar II.1: Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru



C. Konsep Operasional

Untuk menghilangkan dan menghindari dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diketahui dan dijelaskan beberapa konsep operasional. Adapun konsep itu adalah:

1. Administrasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelum. Administrasi dapat dipahami dalam arti sempit, yakni sebagai “tata usaha,” dan dalam arti luas, yaitu sebagai proses kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.
2. Organisasi dapat dipahami sebagai wadah dan proses. Sebagai proses yaitu merupakan suatu wahana kegiatan yang mencerminkan bahwa organisasi merupakan tempat beraktivitas saja. Sebagai proses, yaitu organisasi dipandang sebagai suatu system yang berproses.
3. Kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu, kebijakan publik tidak bersifat acak tetapi mempunyai sasaran dan berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik dibuat oleh pihak yang berwenang. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang simultan dan bukan keputusan yang terpisah-pisah.
4. Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

5. Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.
6. Pengemis adalah Orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
7. Gelandangan adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal layak, pekerjaan tetap, dan hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain yang tidak sepatasnya menurut aturan dan norma kehidupan masyarakat.

D. Operasional Variabel

Tabel II.1: Operasional Variabel Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian
1	2	3	4
Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan public, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi nya, Edwards (1980)	Pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis	Komunikasi	1. Pembinaan yang diberikan harus dilakukan dengan jelas dan mudah dimengerti 2. Melakukan sosialisasi
		Sumber Daya	1. Ketersediaan staff pelaksana yang cukup untuk melaksanakan program pembinaan 2. Tersedia nya fasilitas (sarana dan prasarana) untuk melaksanakan program pembinaan
		Disposisi (sikap)	1. Pemahaman terhadap program pembinaan yang akan dilakukan 2. Komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis pelaksana guna mencapai tujuan.
		Struktur Birokrasi	1. Membuat SOP atau aktivitas terencana rutin dalam melaksanakan kegiatan pembinaan. 2. Pembagian tugas kerja untuk mempermudah pelaksanaan program pembinaan

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian, tipe penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2020;18) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif. Deskriptif yaitu peneliti melakukan penelitian langkung ke Dinas Sosial dan Pemakaman Pekanbaru untuk memperoleh dan menemukan fakta yang sebenarnya yang menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena dan kejadian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) yang berlangsung dilapangan berdasarkan fakta-fakta pada saat tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru, dan yang menjadi objek penelitian yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja Nomor 6 Kota Pekanbaru. Adapun alasan dipilih penelitian ini karena Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru merupakan dinas yang mengurus pembinaan bagi gelandangan dan pengemis.

C. Informan dan Key Informan Penelitian

Informan adalah seseorang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau masalah tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005:171-172), Informan Penelitian meliputi tiga macam yaitu:

1. Informasi kunci (key informan) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan umum, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru, maka peneliti memilih orang-orang yang mengetahui dan terlibat langsung dalam objek yang sedang diteliti.

Tabel III.1: Informan Dan Key Informan Penelitian Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru

No	Responden Penelitian	Jumlah
1	Kepala Bidang Rehabilitas Sosial	1
2	Kepala Seksi Rehabilitas Tuna Sosial	1
3	Staff Rehabilitas Tuna Sosial	1
4	Masyarakat	3
4	Gelandangan dan Pengemis	3
	Jumlah	9

Sumber data: Data Olahan Penulis, 2021

D. Teknik Penarikan Informan

Teknik penetapan informan yang peneliti gunakan dalam penelitian Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2020;289)

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh langsung oleh penulis untuk memperoleh jawaban yang relevan dan pemahaman yang baik tentang permasalahan yang diteliti melalui alat pengumpulan data berupa wawancara, angket, dan observasi.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data dan informasi pelengkap yang penulis peroleh dari instansi yang berhubungan dalam penelitian ini yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Data tersebut dapat berupa arsip, literature, buku, dan lainnya yang digunakan sebagai data. Adapun data sekundernya yaitu:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial
- b. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota
- d. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu penulis berdialog langsung secara lisan dengan menyiapkan beberapa pertanyaan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan
2. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan tentang permasalahan yang ada guna mengetahui gambaran umum pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis.
3. Dokumentasi, yaitu salah satu alat pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen dalam melakukan penelitian

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam penyusunan penelitian, menurut Miles dan Hubrman (2010:129) ada tiga macam kegiatan daalam analisis data kualitatif, yaitu :

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumen atau gabungan ketiganya (triangulasi). Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang banyak dan bervariasi.

2. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih dan memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3. Penyajian data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian atau laporan sesuai hasil.

4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Data display yang dikemukakan bila telah didukung oleh data-data yang mantap maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.

H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian mengenai Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel III.2 berikut:

Tabel III.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																							
		April				Juni				Juli				Sep				Okt				Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■																						
2	Seminar UP					■																			
3	Revisi UP											■													
4	Revisi Wawancara											■	■												
5	Rekomendasi Survey													■	■										
6	Survey Lapangan														■	■									
7	Analisis Data															■	■								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																	■	■						
9	Konsultasi Revisi Skripsi																		■	■					
10	Ujian Komprehensif Skripsi																					■	■		
11	Revisi Skripsi																								■
12	Pengaduan Skripsi																								■

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian yang dibahas dalam 6 bab, yang mana masing-masing pembahasan tiap bab mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, didalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tinjauan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Pada bab ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melaukan pembahasan penelitian skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, konsep operasional, dan operasional variabel.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi Penelitian, informan dan key informan penelitian, teknik penarikan informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum tentang sejarah singkat Kota Pekanbaru, gambaran umum Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru, visi misi Dinas Sosial Dan

Pemakaman Kota Pekanbaru, tugas fungsi dan struktur organisasi Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru, dan Informasi lainnya yang relevan terkait dengan judul penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari identitas responden penelitian, hasil penelitian dan hasil pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya ke dalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Kota Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

1. Letak Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ Km² menjadi $\pm 446,50$ Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Kota Pekanbaru secara geografis terletak pada posisi yang strategis dan terletak pada jalur lintas Timur Sumatra. Kota Pekanbaru terhubung dengan beberapa kota lain yaitu Kota Jambi, Kota Medan, dan Kota Padang dengan wilayah administratif. Pekanbaru diapit oleh Kabupaten Kampar pada bagian barat dan selatan, sementara pada bagian utara dan timur Kota Pekanbaru yaitu Kabupaten Siak. Kota Pekanbaru merupakan Kota yang dialiri oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian dengan perkiraan antara 5 sampai 50 meter di atas permukaan laut. Kota Pekanbaru termasuk kota yang memiliki iklim tropis dengan suhu udara maksimum dengan perkiraan antara $34,1^{\circ}\text{C}$ sampai $35,6^{\circ}\text{C}$, dan suhu minimum antara $20,2^{\circ}\text{C}$ sampai $23,0^{\circ}\text{C}$.

Agar lebih tercapainya ketertiban dalam pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka akan dibentuklah beberapa Kecamatan Baru dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Peraturan Daerah tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya sebagai berikut:

Pekanbaru	Taluk Kuantan	= 118 Km
	Rengat	= 159 Km
	Tembilahan	= 21,3,5 Km
	Kerinci	= 33,5 Km
	Siak	= 74,5 Km
	Bangkinang	= 51 Km
	Pasir Pangaraian	= 132,5 Km
	Bengkalis	= 128 Km
	Bagan	= 192,5 Km
	Dumai	= 125 Km

2. Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru (Jawi: **ورابنكڤ اتوك**) adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru adalah ibu Kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.

Kota Pekanbaru memiliki slogan “Pekanbaru Kotaku, Kotamu, Kota Kita Bertuah” atau sering disingkat dengan “Pekanbaru Kota Bertuah” yang mana slogan tersebut telah melekat dan menjadi ciri khas dari kota Pekanbaru. Slogan menjadi ciri khas bagaimana selayaknya masyarakat di suatu kota tersebut beraktivitas. Namun sekarang Pemerintah Kota Pekanbaru mengganti slogan “Pekanbaru Kotaku, Kotamu, Kota Kita Bertuah” atau sering disingkat dengan “Pekanbaru Kota Bertuah” yang telah ada kemudian dengan slogan “Pekanbaru Kota Madani”. Namun, pada kenyataannya meskipun perubahan slogan telah berjalan, sebagian besar masyarakat kota Pekanbaru masih tidak mengetahui perubahan tersebut bahkan tetap beranggapan bahwa Pekanbaru masih menggunakan slogan Pekanbaru Kota Bertuah.

Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, dan terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.

Perekonomian Pekanbaru didukung oleh perdagangan dan pertambangan minyak bumi. Saat ini kota Pekanbaru sedang berkembang pesat jadi kota dagang yang multietnik, Keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk di manfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi minang kabau ke wilayah pesisir Selat Malaka.

Pekanbaru terletak di tepian Sungai Siak dan pada awalnya merupakan sebuah kota kecil yang memiliki pasar (*pekan*) yang bernama Payung Sekaki atau Senapelan yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Senapelan dahulunya adalah sebuah daerah yang dihuni oleh Suku Senapelan yang saat itu mereka bermukim di wilayah Pekanbaru sekarang dan sampai ke Kuala Tapung (Bencah Kelubi).

Sebelumnya Suku Senapelan hanyalah sekumpulan masyarakat yang mendiami sebuah wilayah kecil namun lambat laun Suku tersebut membuat batasan wilayah guna melindungi sukunya dari gangguan suku lain, seperti mengantisipasi agar daerah untuk berladang tidak diambil oleh suku lain.

Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya, melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang.

Semakin hari semakin berkembang, dusun Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan yang penting dalam aktivitas perdagangan. Keberadaan dusun Payung Sekaki atau Senapelan yang strategis dan kondisi sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini menjadi tempat lalu lintas perdagangan

dan membuat Senapelan memegang posisi yang penting, baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal inilah yang membuat semakin pesat berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Tepat pada abad ke-18 daerah dusun Senapelan yang terletak di tepian Sungai Siak menjadi pasar bagi para masyarakat dan pedagang yang berasal dari dataran tinggi Minang Kabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, Berdasarkan musyawarah” Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minang Kabau (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari di peringati sebagai hari jadi kota ini.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.

4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

3. Visi Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yakni **“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa.”**

Dalam rangka percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru tahun 2021 yang dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru periode 2017-2022, menetapkan Visi untuk lima tahun kepemimpinannya yaitu: **“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”**.

Untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi yang ada, memperhitungkan peluang yang dimiliki,

dan memperkirakan tantangan yang akan dihadapi kedepan, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut :

- Pertama : Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi
- Kedua : Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu
- Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik
- Keempat : Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
- Kelima : Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terbentuk setelah Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun bukan berarti Indonesia sudah merdeka sepenuhnya serta merasa terbebas dari penjajah. Pada kenyataannya Belanda tidak mau melepaskan begitu saja jajahannya walaupun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan. Belanda berniat kembali ingin menjajah kembali Negara Indonesia dengan cara mempersiapkan seluruh pasukan tempur dengan kekuatan penuh untuk kembali menguasai Indonesia. Kemudian terjadilah peperangan yang sangat sengit antar 2 bangsa yang mempunyai

perbedaan tujuan dan kemauan. Saat terjadinya peristiwa peperangan ini, banyak kekacauan yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan banyak masyarakat yang mengungsi.

Akibat dari terjadinya peristiwa ini membuat tumbuhnya rasa persaudaraan yang kuat dan kental antar para pejuang, relawan, pengungsi, dan juga orang yang ikut terlibat dalam peristiwa peperangan tersebut. Peristiwa ini diperingati Hari Kesetiakawanan Sosial yang bertepatan pada tanggal 22 Desember 1947 yang merupakan awal mula lahirnya Kementerian Sosial. Sampai saat ini pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia tiap bertepatan pada 22 Desember memperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) ataupun hari jadi Departemen Sosial. Pada tahun 1948 pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru berdiri serta sedang dilanda peperangan merasakan perlunya dibangun sesuatu lembaga yang legal yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka untuk membantu jika suatu saat akan terjadi peperangan lagi sehingga pada tahun itu dibentuklah Inspeksi Sosial mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah wilayah yang tugas pokoknya untuk memberikan bantuan kepada TNI Republik Indonesia dalam peperangan.

Setelah itu pada tahun 1950 lembaga Inspeksi Sosial naanya diganti menjadi Jawatan Sosial yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu korban perang serta para veteran pejuang. Setelah itu pada tahun 1965 Jawatan Sosial bukan hanya bertugas untuk membantu para korban perang serta veteran pejuang, Jawatan Sosial juga bertugas untuk membantu penyandang cacat, organisasi sosial, dan juga tenaga kerja Indonesia. Bertepatan pada tahun 1974 lembaga

Jawatan Sosial mengganti namanya menjadi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk tingkatan pusat dikepalai oleh seseorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat propinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Propinsi yang dikepalai oleh seseorang kepala departemen, sedangkan buat tingkatan kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/ Kota, dan untuk tingkat kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang berlokasi di kantor camat setempat.

Departemen Sosial mempunyai tugas utama untuk para perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, karang taruna, penyandang cacat, panti asuhan, korban bencana, fakir miskin, organisasi sosial, lembaga sosial, korban perdagangan anak, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, gelandangan serta pengemis(gepeng), korban HIV/ AIDS, pekerja seks komersil, korban napza, dan komunitas adat terpencil. Di tahun 1998 Departemen Sosial sempat dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada dikala itu sedang menjabat yaitu KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alibi yang tidak jelas. Serta pada tahun 1999, Departemen Sosial diaktifkan kembali dan berubah nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional(BKSNI) di tingkat pusat. Setelah itu pada tahun 2000 ditukar kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia.

Kemudian pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia yang sudah dibubarkan tersebut kembali diaktifkan oleh Presiden yang pada waktu itu sedang menjabat yaitu Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu pula untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka

kemudian di bentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001 . Selanjutnya di tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru merupakan sebagai unsur pelaksana pemerintah ditingkat kota/daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang sampai pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari satu orang sekretaris dan tiga Kepala Bidang (Kabid), sembilan Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional yang dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru.

Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2004 dibuatkanlah 6 (enam) tempat

pemakaman umum yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan ditangani oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

C. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Setiap lembaga organisasi ataupun instansi pemerintahan diwajibkan untuk mempunyai suatu pandangan dan pencapaian ke depannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang dalam arti kata adanya visi dan misi, agar apa yang akan dilaksanakan itu terorganisir dengan baik, terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditetapkan. Penetapan visi merupakan sebagian dari perencanaan strategic dan merupakan suatu langkah yang penting dalam perjalanan suatu lembaga organisasi pemerintahan. Adapun visi dan misi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut :

Visi : Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama, bahwa visi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi PPKS/PSKS dilandasi kesetiakawanan sosial serta pemakaman yang indah dan tertib”.

Dari visi di atas, dapat dirumuskan misi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja.
- Meningkatkan dan memberdayakan PMKS/PSKS agar tumbuh dan berkembang dalam sistem masyarakat.
- Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja PMKS dan PSKS.

- Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal melalui Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM).
- Menciptakan lapangan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

D. Struktur Organisasi Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru



E. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas- Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota di bidang Kesejahteraan Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 tahun 2016, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut :

1. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.
2. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
3. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
4. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial.
5. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada kelayan yang telah dilatih dan diberi bantuan.
6. Pengelolaan dan Pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

7. Pelaksanaan Koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
8. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
9. Pengelolaan Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), pengurus Karang Taruna dan lembaga sosial Masyarakat di kelurahan/desa.

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani PPKS dan PSKS yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas** mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang sosial.
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
 - e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.
 - f. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris mempunyai tugas Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapatdinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi serta bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

1) **Sub Bagian Umum** memiliki mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Sub bagian umum memiliki fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
- b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
- c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- g. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- h. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- i. Pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah

- j. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- k. Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan Dinas.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub bagian keuangan memiliki fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
 - d. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.

- e. Pelaksanaan fasilitasi dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- f. Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin, lembaga-lembaga sosial, dan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyebar luasan nilai-nilai kepahlawanan, dan restorasi sosial.
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial.
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan inventarisasi data

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di bidang tugasnya.

- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan kerjasama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penyusunan laporan dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya.
- h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi:

- 1) **Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan sub urusan Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin. Perumusan dan penyiapan bahan dan peralatan kerja, jenis dan jumlah peralatan kerja yang dibutuhkan. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan rencana kerja kegiatan yang akan dilaksanakan secara rinci serta membuat tolok ukur keberhasilan tugas.
- b. Perumusan, monitor, evaluasi pelaksanaan tugas, untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai.

- c. Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang guna penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- d. Perumusan dan pelaksanaan pendataan, penyuluhan dan bimbingan sosial bagi keluarga miskin serta lokasi daerah kumuh fakir miskin.
- e. Pelaksanaan peningkatan kemampuan petugas lapangan.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui bimbingan keterampilan, bantuan modal usaha dan modal kerja dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga miskin.
- g. Pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial dan bantuan usaha ekonomis produktif bagi keluarga rentan.
- h. Perumusan dan pelaksanaan pembinaan, pemberian bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan pengembangan usaha keluarga binaan sosial serta merehabilitasi sosial daerah kumuh keluarga miskin.
- i. Perumusan dan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.
- j. Perumusan dan pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok Usaha Bersama (KUB).
- k. Perumusan dan pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan Program Bantuan Keluarga Miskin.
- l. Perumusan dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan meliputi masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna

pemecahan masalah.

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) **Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan sub urusan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan bahan dan peralatan kerja, jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan.
- b. Perumusan dan penyusunan rencana kerja kegiatan yang dilaksanakan secara rinci, serta membuat tolok ukur keberhasilan tugas.
- c. Perumusan, monitor, evaluasi pelaksanaan tugas, untuk mengetahui hasil-hasil yang dicapai.
- d. Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Perumusan dan pendataan terhadap Organisasi Sosial/Lembaga Sosial Masyarakat/Yayasan, Panti Sosial, Karang Taruna, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak serta penyusunan profil, pendataan kebutuhan komunikasi dan informasi edukasi pembangunan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) maupun masyarakat pada umumnya.

- f. Pelaksanaan pembinaan dan pemantapan organisasi/lembaga sosial beserta pengurusnya.
- g. Perumusan dan penyediaan sarana dan prasarana organisasi/lembaga sosial, pembinaan peran kelembagaan sosial masyarakat dan dunia usaha, peningkatan partisipasi sosial masyarakat serta pelayanan jaminan kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial.
- h. Pelaksanaan pemberian izin operasional Organisasi Sosial/Lembaga Sosial Masyarakat/Yayasan, Panti Sosial, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak.
- i. Pelaksanaan pemberian izin operasional sosial dan forum komunikasi dan konsultasi, penyediaan perangkat, petugas analisis, programmer dan operator.
- j. Perumusan pengembangan kerjasama dan petunjuk teknis pengembangan organisasi sosial/lembaga penyandang dana dan dunia usaha.
- k. Perumusan dan penyempurnaan pola, pedoman dan petunjuk teknis pengembangan organisasi/lembaga sosial khususnya pengembangan partisipasi sosial masyarakat.
- l. Pelaksanaan peningkatan penyuluhan sosial kepada masyarakat terutama generasi muda.
- m. Pelaksanaan peningkatan bimbingan, pendidikan dan pelatihan keterampilan pengurus Karang Taruna, Organisasi Sosial/Lembaga

Sosial, Panti Sosial, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dalam bidang manajemen, usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan dan keterampilan.

- n. Perumusan dan pelaksanaan pengembangan forum-forum komunikasi.
- o. Pelaksanaan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pembinaan terhadap Organisasi Sosial/Lembaga Sosial Masyarakat/Yayasan. Panti Sosial, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
- p. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi permasalahan dan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah di bidang tugasnya.
- q. Perumusan dan pelaksanaan rekrutmen, pendidikan, pembinaan sumber daya manusia sebagai petugas penyuluh dan pembimbing sosial.
- r. Perumusan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan dan bimbingan sosial.
- s. Perumusan penyempurnaan pola dan materi penyuluhan dan bimbingan sosial bekerjasama dengan berbagai lembaga ilmiah, organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan badan internasional.
- t. Perumusan dan pelaksanaan pembinaan teknis, bimbingan umum, bimbingan sosial, pengenalan masalah, teknis pengembangan serta peningkatan fungsi sosial wanita.
- u. Pelaksanaan pembinaan serta pengembangan pekerja sosial

masyarakat serta pemutakhiran data kuantitatif dan kualitatif Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

- v. Pelaksanaan pemantapan sarana pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
- w. Perumusan dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah-langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah.
- x. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi

Sosial mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan sub urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan bahan atau peralatan kerja dengan cara merinci jenis, jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja yang mudah diambil dan digunakan.
- b. Perumusan dan penyusunan rencana kerja dengan merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan sudah sesuai atau

belum dengan rencana kerja dan tolok ukur keberhasilan yang telah dibuat.

- d. Pelaksanaan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.
- e. Perumusan dan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas.
- f. Pelaksanaan bimbingan, menyebarluaskan nilai-nilai kepahlawanan, peningkatan upaya pelestarian, pengembangan, penghayatan serta mengamalkan nilai-nilai kepahlawanan.
- g. Perumusan dan pelaksanaan pengembalian/pemulihan dalam permasalahan sosial.
- h. Perumusan dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitas Sosial mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di Bidang Rehabilitasi Sosial.
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pelaksanaan

pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak dengan kedisabilitasan, anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna sosial, kaum minoritas, eks penyandang psikotik.

- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan dan penyusunan laporan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan serta pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
- f. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan perumusan rencana kegiatan dibidang tugasnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :

- 1) **Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi sosial dan perlindungan anak. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dan

- merinci jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja.
- b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan pendataan terhadap anak.
 - d. Perumusan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolok ukur keberhasilan yang telah dibuat.
 - e. Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang guna menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis perlindungan dan rehabilitasi sosial anak bermasalah dengan hukum, anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar, anak berkebutuhan khusus (Selain Anak disabilitas).
 - f. Perumusan dan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti.
 - g. Perumusan dan perluasan jangkauan pelayanan dan perlindungan sosial bayi/anak melalui pengangkatan anak (adopsi).
 - h. Perumusan dan peningkatan pelayanan kesejahteraan anak baik dalam panti maupun luar panti dengan memberikan bantuan belajar dan pendekatan gizi. Perumusan dan pembinaan kesejahteraan anak termasuk balita melalui panti sosial, kelompok bermain dan penitipan

anak.

- i. Perumusan dan penyiapan rekomendasi pengangkatan anak (adopsi).
- j. Perumusan dan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang ada di bidang tugasnya.
- k. Perumusan dan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.
- l. Perumusan dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) **Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan sub urusanrehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja agar mudah diambil dan digunakan.
- b. Perumusan dan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolok ukur keberhasilan tugas yang telah

- dibuat.
- d. Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang guna penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidang tugasnya.
 - e. Perumusan dan inventarisasi, identifikasi data penyandang disabilitas.
 - f. Perumusan dan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
 - g. Perumusan dan penyiapan pembinaan, bimbingan dan konsultasi teknis terhadap penyandang disabilitas.
 - h. Perumusan dan penyiapan bahan pembinaan lanjut dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas.
 - i. Perumusan dan pengiriman penyandang disabilitas ke pusat rehabilitasi sosial/panti sesuai dengan kedisabilitasnya.
 - j. Perumusan dan pemberian alat bantu penyandang disabilitas sesuai dengan kedisabilitasnya.
 - k. Perumusan dan peningkatan pelayanan pada sarana Loka Bina Karya (LBK).
 - l. Perumusan dan pembinaan kelompok usaha bersama penyandang disabilitas.
 - m. Perumusan dan pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap semua upaya kegiatan yang dilaksanakan di bidang tugasnya.
 - n. Perumusan dan penyusunan laporan di bidang tugasnya dengan cara

mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.

- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Rehabilitas Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja agar mudah diambil dan digunakan.
- b. Perumusan dan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja tolok ukur keberhasilan tugas yang telah dibuat.
- d. Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang guna menyusun kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan data penyandang tuna sosial (eks Wanita Tuna Susila (WTS), Gelandangan dan Pengemis, gelandangan psikotik, bekas Napi, kaum minoritas),

Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Perdagangan Orang.

- f. Perumusan dan pelaksanaan pencegahan, penertiban bekerjasama dengan pihak terkait dan melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna social(eks Wanita Tuna Susila (WTS), Gelandangan dan Pengemis, gelandangan psikotik).
- g. Perumusan dan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, konsultasi teknis dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial (eks Wanita Tuna Susila (WTS), Gelandangan dan Pengemis, gelandangan psikotik, bekas Napi, kaum minoritas), Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Perdagangan Orang.
- h. Perumusan dan pembinaan lanjut dan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, korban tindak kekerasan, pekerja migran dan perdagangan orang serta orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
- i. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolok ukur keberhasilan yang telah dibuat.
- j. Perumusan dan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya.
- k. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan yang dilaksanakan di bidang tugasnya.
- l. Perumusan dan pembuatan laporan di bidang tugasnya dengan cara

mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perlindungan dan jaminan sosial. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program perlindungan sosial, bantuan, jaminan sosial dan advokasi sosial.
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pembinaan, pemberian bantuan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, bencana sosial dan kerusuhan massa.
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pengendalian dan pengawasan pengumpulan dana bantuan sosial.
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas.
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- g. Pelaksanaan koordinasi, pembina dan perumusan pelaksanaan tugas

lain atas petunjuk pimpinan.

- h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas Bidang.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

1) **Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan sub urusan perlindungan sosial korban bencana. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja agar mudah diambil dan digunakan.
- b. Perumusan dan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang guna menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidang tugasnya.
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan perlindungan terhadap korban bencana, penyiapan dapur umum dan pembinaan terhadap korban bencana, pemulangan pengungsi, korban bencana, orang terlantar atau terdampar di daerah.

- e. Perumusan dan pelaksanaan pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial terhadap korban kerusuhan massa dan hak azasi manusia.
- f. Perumusan dan pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan di lokasi bencana.
- g. Perumusan dan pelaksanaan pengusulan perbaikan rumah/sarana dan prasarana atau pun pemindahan penduduk dari lokasi bencana.
- h. Perumusan dan pelaksanaan penghimpunan data korban bencana dan identifikasi situasi dan kondisi.
- i. Perumusan dan pelaksanaan perlindungan, pemberian bantuan dan rehabilitasi psikososial korban bencana.
- j. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolok ukur keberhasilan tugas yang telah dibuat.
- k. Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya.
- l. Perumusan dan pelaksanaan penghimpunan data korban bencana dan identifikasi situasi kondisi.
- m. Perumusan dan pelaksanaan bimbingan/pelatihan penanggulangan korban bencana dan melaksanakan sosialisasi bantuan dan perlindungan sosial.

- n. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan di bidang tugasnya.
- o. Perumusan dan pelaksanaan pembuatan laporan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan sub urusan pengawasan dan pengendalian sumber dana bantuan sosial. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan ditempat kerja agar mudah diambil dan digunakan.
- b. Perumusan dan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah selesai/belum dengan rencana kerja dan tolok ukur keberhasilan tugas yang telah dibuat.
- d. Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala

- Bidang guna penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Perumusan dan pendataan sumber dana bantuan sosial yang berasal dari dan berada di masyarakat.
 - f. Perumusan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan sumbangan sosial.
 - g. Perumusan dan pelaksanaan secara optimal dan efektif pengendalian dan pengawasan kegiatan.
 - h. Perumusan dan pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan di lokasi bencana.
 - i. Perumusan dan pelaksanaan pengusulan perbaikan rumah/sarana dan prasarana atau pun pemindahan penduduk dari lokasi bencana.
 - j. Perumusan dan pelaksanaan penghimpunan data korban bencana dan identifikasi situasi dan kondisi.
 - k. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap pemberian izin undian, pengumpulan uang atau barang serta usaha pengumpulan sumbangan sosial lainnya.
 - l. Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya.
 - m. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan di bidang tugasnya.
 - n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara

mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.

- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan sub urusan perlindungan dan penyantunan lanjut usia terlantar. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan ditempat kerja agar mudah diambil dan digunakan.
- b. Perumusan dan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang guna menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidang tugasnya.
- d. Perumusan dan pelaksanaan pendataan terhadap Lanjut Usia Terlantar.
- e. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan jaminan sosial Asistensi Lanjut Usia (Aslut) bagi lanjut usia non potensial.
- f. Perumusan dan pelaksanaan pembinaan dan pengiriman kesejahteraan lanjut usia terlantar ke panti asuhan.

- g. Perumusan dan pelaksanaan bimbingan sosial dan pemberian bantuan usaha ekonomis produktif lanjut usia terlantar potensial.
- h. Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya.
- i. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan dibidang tugasnya.
- j. Perumusan dan pelaksanaan pembinaan dan pengiriman kesejahteraan lanjut usia terlantar ke panti sosial.
- k. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah-langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh peneliti dari responden melalui wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat mengenai Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara, pengumpulan dokumentasi dan observasi.

Peneliti berhasil mendapatkan informan kunci di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Berikut responden yang peneliti temukan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru:

Tabel V.1: Identitas Key Informan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan	Pendidikan
1	Dian Permata Indah, SE.	Perempuan	42 Tahun	Kepala Bidang Rehabilitas Sosial	S1
2	H.Agustian, AP, M.Si.	Laki-Laki	45 Tahun	Kepala Seksi Rehabilitas Tuna Sosial	S2
3	Zainal Arifin, SE.	Laki-Laki	50 Tahun	Staff Rehabilitas Tuna Sosial	S1

Sumber data: Data Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas, yang menjadi Key Informan yang dipilih penulis dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berjumlah tiga orang. Yang

menjadi Key Informan dalam penelitian Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah Ibu Dian Permata Indah, SE selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial. Key informan selanjutnya adalah Bapak H.Agustian, AP, M.Si selaku Kepala Seksi Rehabilitas Tuna Sosial, dan Bapak Zainal Arifin, SE. selaku Staff Rehabilitas Sosial.

Tabel V.2: Identitas Informan Masyarakat Terdampak Gelandangan dan Pengemis

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	Mita	Perempuan	50 Tahun	SMA	Penjual Koran
2	Mar	Perempuan	57 Tahun	SMA	Penjual Koran
3	Nurul	Perempuan	26 Tahun	S1	Pegawai Swasta

Sumber Data: Data Olahan Penulis, 2021

Untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat yang berada di sekitar tempat yang biasa dilakukan kegiatan mengemis oleh gelandangan dan pengemis, dan juga masyarakat pengguna jalan yang melintasi daerah lokasi gelandangan dan pengemis, informan masyarakat yang dipilih oleh peneliti berjumlah tiga orang.

Tabel V.3: Identitas Informan Gelandangan dan Pengemis

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Herni Hailis	46 Tahun	Perempuan	SD
2	Agus	40 Tahun	Laki-Laki	-
3	Fuadi	62 Tahun	Laki-Laki	SMP

Sumber Data: Data Olahan Penulis, 2021

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembinaan kepada gelandangan dan pengemis, peneliti melakukan wawancara langsung kepada tiga orang Gelandangan dan Pengemis yang sedang beroperasi meminta uang kepada masyarakat pengguna jalan yang berada di sekitar kawasan gelandangan dan pengemis.

B. Analisis Dan Pembahasan Penelitian Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai kewenangan untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru pasal 8 Ayat 4: “Tindak lanjut razia pada ayat 1 dan ayat 2 di koordinasikan dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik pemerintah Daerah dan/atau panti swasta dan/atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar kota Pekanbaru”.

Kemudian tugas Seksi Rehabilitas Tuna Sosial Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan dan pengemis tertuang dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Pasal 29 poin (g) merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, konsultasi teknis dan rehabilitas sosial penyandang tuna sosial (eks WTS, gelandangan dan pengemis, gelandangan psikotik, bekas

napi, kaum minoritas), korban tindak kekerasan, pekerja migran dan perdagangan orang serta ODHA.

Sehubungan dengan tugas dan kewenangan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru diatas maka untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru peneliti melakukan wawancara kepada responden sesuai dengan Model Implementasi menurut George C Edward III dengan indikator-indikator yang sangat berpengaruh dan menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi (Sikap)
4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan indikator - indikator keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C Edwards III, maka peneliti dapat melakukan wawancara kepada informan dan keyinforman untuk melakukan suatu penelitian, dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus di lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide di antara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana cara penyampaian Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru kepada masyarakat, gelandangan dan pengemis mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial yang akan diimplementasikan guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Item penilaian dari indikator komunikasi yaitu:

a. Pembinaan Yang Diberikan Harus Dilakukan Dengan Jelas dan Mudah Dimengerti

Dari hasil wawancara peneliti bersama key informan Ibu **Dian Permata Indah, SE** selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru, beliau memberikan informasi bahwa:

“Pembinaan yang kami berikan kepada gelandangan dan pengemis kami lakukan langsung saat kami melakukan penyuluhan ke jalan lalu di sampaikan kepada mereka yang sedang menggelandang di jalan, bahwa mereka dilarang dan tidak boleh berada disini lalu gepeng nya akan dibawa ke dinas untuk dilakukan rehabilitas. Kemudian saya juga memberikan informasi berupa arahan kepada petugas yang sedang piket akan bertugas untuk turun ke lapangan menangani gelandangan pengemis ini maupun kepada petugas yang akan melakukan kegiatan pembinaan di Dinas Sosial secara langsung”.

(Wawancara: Kamis, 16 September 2021 Pukul 10.50 Wib)

Peneliti sebelumnya sudah melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama dengan Bapak **H. Agustian, AP, M.Si** selaku Kepala Seksi Rehabilitas Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru, kemudian beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“Dalam melakukan pembinaan gepeng, pembinaan ini banyak ragam nya, ada dalam bentuk tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif tujuannya untuk menekan pertumbuhan gepeng

dengan cara menyebarkan brosur, dan juga memasang baliho. Tindakan preventif ini sasarannya lebih ditujukan khusus kepada masyarakat sekitar. Kemudian untuk pembinaan gepeng nya dilakukan disini, kita berusaha lah melengkapi apa-apa saja yang dibutuhkan gepeng tersebut, kita ajak mereka diskusi dan sharing, untuk programnya banyak ada pembinaan sosial, mental, sandang dan pangan, dsb ”.

(Wawancara: Kamis, 16 September 2021 pukul 09.55 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Dian Permata Indah, SE selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial dan Bapak H.Agustian, AP, M.Si dapat diketahui bahwa dalam melakukan pembinaan gelandangan pengemis, Kepala Bidang Rehabilitas Sosial memberikan informasi kepada staff dalam bentuk arahan secara langsung sebelum staff melaksanakan tugasnya.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada informan Ibu **Herni Hailis** sebagai gelandangan dan pengemis di simpang empat lampu merah fly over pasar pagi arengka mengenai sub indikator informasi, yaitu:

“Iya ada beberapa kali waktu saya lagi duduk disini mereka datang mendekat ke saya, untung aja belum pernah dibawak ke dinas, saya ditegur aja dan saya disuruh langsung pulang kerumah, kalau saya tidak mau pulang nanti saya akan dibawak sama mereka ke dinas dan ditahan tujuh hari, tapi besok nya saya pasti tetap duduk disini lagi untuk dapat uang buat kehidupan sehari-hari ”

(Wawancara: Jumat, 27 Agustus 2021, pukul 11.02 Wib)

Dari hasil kutipan wawancara dengan Informan Ibu Herni Hailis sebagai gelandangan dan pengemis, beliau sudah dilarang oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru bahwa mereka tidak boleh menggelandang dan mengemis di jalanan dan ditempat lainnya kemudian mereka dihimbau untuk langsung pulang

kerumah, namun karena desakan ekonomi gelandangan dan pengemis ini tetap kembali menggelandang dan mengemis ke jalanan seperti biasanya.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah berupaya untuk memberikan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis, pembinaan yang diberikan yaitu mulai dalam bentuk tindakan-tindakan, seperti tindakan preventif yaitu usaha untuk menekan dan meniadakan gelandangan pengemis melalui pemasangan baliho, penyebaran brosur, dan leaflet.

Tindakan preventif yang dilakukan Dinas Sosial merupakan salah satu bagian dari pembinaan gelandangan dan pengemis yang berbasis masyarakat, tujuannya agar Dinas Sosial Kota Pekanbaru mendapatkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menekan pertumbuhan gelandangan dan pengemis dengan cara berhenti memberikan uang atau sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan yang dilakukan melalui usaha rehabilitas yaitu pembinaan yang dilakukan di luar panti, namun berdasarkan observasi peneliti bahwa sudah ada gelandangan dan pengemis yang sudah pernah terjaring razia oleh Dinas sosial Kota Pekanbaru namun mereka belum pernah mendapatkan pembinaan dalam bentuk rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang mengakibatkan beberapa hari kemudian mereka sudah kembali ke jalan untuk menggelandang dan mengemis.

b. Melakukan Sosialisasi.

Sosialisasi merupakan salah satu sarana yang bisa dipakai untuk melakukan proses komunikasi karena informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar dapat pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, dan arah kebijakan. Sub indikator sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu peneliti ingin mengetahui hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan sosialisasi kepada target group dalam kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008.

Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, peneliti melakukan wawancara bersama Bapak **H. Agustian, AP, M.Si** selaku Kepala Seksi Rehabilitas Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru, mengenai sosialisasi beliau menjelaskan:

“Sosialisasi itu salah satu bentuk pembinaan gepeng yang kami lakukan dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis ini, sosialisasi termasuk dalam pembinaan yang termasuk dalam tindakan respresif yaitu ada jadwalnya kami tiba-tiba turun ke lapangan turun ke jalan langsung untuk menjangkau gelandangan dan pengemis tersebut, kalau untuk masyarakatnya belum bisa ya kami mencegah masyarakat untuk tidak memberi uang kepada gelandangan dan pengemis ini, karena orang-orang yang datang dari luar kota Pekanbaru masih banyak yang tetap memeberi uang kepada gepeng ini, apalagi penegakan sanksi untuk masyarakat yang masih memberikan uang kepada gelandangan ni belum ada”

(Wawancara: Kamis, 16 September 2021, pukul 09.55 Wib)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Keyinforman diatas dapat dilihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada gelandangan dan pengemis termasuk dalam salah satu bentuk

pembinaan gelandangan dan pengemis yaitu melalui tindakan-tindakan represif dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru seperti melakukan penyuluhan dan penertiban gelandangan dan pengemis. Hasil pengamatan peneliti sejauh ini masyarakat masih banyak yang tetap memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis, kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam menekan jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru juga menjadi pemicu terhambatnya kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menekan jumlah Gelandangan dan pengemis.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara mengenai sub indikator sosialisasi dengan Bapak **Zainal Arifin, SE.** selaku staff rehabilitas sosial, beliau menjelaskan:

“Untuk sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat yaitu sosialisasi dalam bentuk menyebarkan brosur, ada baliho-baliho yang kami pasang di titik rawan geepeng, itu salah satu bentuk himbauan kami lah kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan pengemis disini. Kebijakan tentang larangan pemberian uang kepada gelandangan di jalan saya rasa belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Masyarakat masih banyak yang memberi uang kepada mereka di jalan. Sepertinya masyarakat belum mengerti bahwa semakin sering gelandangan di jalan di beri uang semakin senang mereka menggelandang”.

(Wawancara: Kamis, 16 September 2021, pukul 11.30)

Dari kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Zainal Arifin, SE sebagai staff rehabilitas sosial, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media cetak seperti baliho dan menyebarkan brosur, namun hingga sampai saat ini upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menekan jumlah gelandangan dan pengemis melalui sosialisasi masih sering

diabaikan oleh masyarakat karena masih banyak masyarakat yang enggan membaca dan kurang peduli terhadap pentingnya sosialisasi yang diberi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru lakukan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu **Mar** sebagai masyarakat pengguna jalan yang berada di sekitar tempat aktivitas gelandangan dan pengemis:

“Kalau untuk sosialisasi secara langsung itu belum pernah saya terima, saya kan jualan koran disini setiap hari disini, palingan lihat mereka diangkat aja, tak lama lagi balek lagi kesini. Keberadaan gelandangan dan pengemis ini juga meresahkan ya menurut saya, tapi di satu sisi di masa covid sekarang ini untuk mencari lapangan pekerjaan memang sangat susah, tapi bukan berarti itu menjadi alasan mereka buat mengemis dan meminta minta dijalan”

(Wawancara: Jumat, 27 Agustus 2021, pukul 13.45 Wib)

Adapun hasil wawancara peneliti dengan saudari **Nurul** masyarakat pengguna jalan, beliau memberikan informasi:

“Saya pernah melihat Dinas sosial Kota Pekanbaru di simpang tiga Hotel City Smart Marpoyan sedang mengamankan orang-orang yang duduk-duduk di lampu merah ini, kadang kita memberikan dia uang itu karna ingin berbagi rezeki aja ingin sedekah, walaupun kita juga tahu saat kita memberikan uang ini bisa membuat mereka semakin manja dan malas untuk bekerja”.

(Wawancara: Jumat, 27 Agustus 2021, pukul 14.21 Wib)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Informan dan Keyinforman dapat dilihat bahwa Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam melakukan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis, namun upaya-upaya yang dilakukan dirasa masih kurang maksimal karena masih banyak gelandangan dan pengemis yang kembali mengemis dan menggelandang dijalan untuk meminta-minta, ditambah

dengan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut menekan pertumbuhan gelandangan dan pengemis, karena masih banyak beberapa masyarakat yang masih tetap memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis meskipun sudah ada larangan dari dinas terkait.

Analisis peneliti berdasarkan pada observasi lapangan dan wawancara yang peneliti untuk indikator komunikasi terlihat bahwa komunikasi yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi antara Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru kepada masyarakat dinilai belum bisa berjalan secara maksimal. Penyampaian pesan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum menyeluruh hingga ke seluruh lapisan masyarakat, pasalnya karena informasi dan sosialisasi yang disampaikan hanya dilakukan pada titik-titik tertentu saja.

Peneliti berpendapat bahwa minimnya sosialisasi yang dijalin oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pembinaan gelandangan dan pengemis belum bisa terlaksana secara maksimal. Kurangnya komunikasi yang dilakukan mengakibatkan minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan, sehingga Dinas Sosial Kota pekanbaru belum bisa mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat untuk turun serta berperan dalam menekan pertumbuhan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru

Jadi dengan demikian untuk meningkatkan keberhasilan tercapainya program pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota pekanbaru hendaknya aturan mengenai kebijakan Pemerintah harus bisa dikomunikasikan dan

disosialisasikan dengan baik sehingga setiap aturan dan prosedur pada pelaksanaan dapat dipahami dan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya yang penting untuk menjalankan suatu program dalam kebijakan yaitu meliputi sumber daya manusia yang memadai, mencukupi. Selain sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi salah satu syarat melaksanakan suatu kebijakan. Untuk mengetahui bagaimana kualitas sumber daya yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial untuk mengatasi keberadaan gelandangan dan pengemis maka peneliti melakukan wawancara dengan informan dan keyinformant dengan menggunakan beberapa sub indikator, yaitu:

a. Ketersediaan staff pelaksana yang cukup untuk melaksanakan program pembinaan.

Untuk mengimplementasikan program yang termuat dalam suatu kebijakan, tentunya sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas baik teknis ataupun praktis. Karena dengan adanya petugas pelaksana yang berkualitas dan unggul akan memberikan kemudahan dan kelancaran bagi organisasi pelaksana untuk bisa mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Untuk mengetahui ketersediaan staff yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk melaksanakan program pembinaan gelandangan dan pengemis,

maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak **H. Agustian, AP, M.Si** selaku Kepala Seksi Rehabilitas Sosial, dengan hasil:

“Sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru saya rasa sudah cukup untuk melakukam pembinaan kepada gelandangan dan pengemis ini. Jumlah sumber daya manusia yang tersedia ada delapan belas orang yang bertugas untuk turun lapangan”.

(Wawancara: Kamis, 16 September 2021, Pukul 09.55 Wib)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak **Zainal Arifin, SE** staff rehabilitas sosial, beliau mengatakan:

“Kalau untuk jumlahnya saya merasa sudah cukup untuk menangani gelandangan dan pengemis ini, jumlah tim kami lumayan ramai. Cuma walaupun jumlah saya dan rombongan saya ini lumayan ramai, kami tetap kuwalahan juga dalam menangani mereka ini, karena setiap kali melihat kami datang ke mereka, kadang mereka langsung kabur, jadi disitu saja kadang repotnya kami sebagai petugas”

(Wawancara: Kamis, 16 September 2021, Pukul 11.30 Wib)

Berdasarkan wawancara bersama dua keyinforman dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mengenai sub indikator sumber daya manusia yang tersedia untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis sesuai dalam Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, adapun hasil pengamatan peneliti bahwa sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah cukup memadai untuk mengamankan gelandangan dan pengemis yang sedang beraktivitas menggelandang dan mengemis di persimpangan jalan, namun Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih tetap mengalami kendala walaupun personilnya sudah cukup karena gelandangan dan pengemis susah untuk diamankan.

Untuk memperdalam hasil penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak **Fuadi** yaitu gelandangan dan pengemis yang sedang duduk di Persimpangan lampu merah fly over pasar pagi arengka, beliau mengatakan:

“Saya selalu duduk disini aja, saya ni sudah tua sudah umur 62 tahun, saya tidak bisa bekerja lagi, jadi saya disini untuk mencari makan saya sehari-hari saja. Saya tau saya begini banyak orang yang tidak nyaman tapi mau bagaimana, saya bisa menyambung hidup dengan cara begini. Pernah pihak dinas datang kesini, kadang mereka datang 2 mobil”.
(Wawancara: Jumat, 27 Agustus 2021, Pukul 10.30 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan gelandangan dan pengemis diatas, dapat diketahui bahwa sebagian dari gelandangan dan pengemis yang beraktivitas di jalanan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah orang dengan usia lanjut yang sudah tidak punya pekerjaan tetap yang kemudian memilih untuk hidup dijalan. Kemudian dapat dilihat juga bahwa saat menjalankan tugasnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menangani gelandangan dan pengemis dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang cukup.

Berdasarkan observasi lapangan yang telah peneliti lakukan dalam penelitian Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru, dapat dilihat bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah cukup banyak untuk menangani para gelandangan dan pengemis yang sedang berada dijalan, observasi peneliti melihat bahwa petugas yang turun kelapangan untuk merazia gelandangan dan pengemis berjumlah sembilan orang, namun disisi lain peneliti melihat belum tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai skill keahlian

khusus untuk melakukan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis setelah dilakukan penjaringan.

b. Tersedianya Fasilitas (sarana dan prasarana) untuk melaksanakan program pembinaan.

Untuk mendukung implementasi kebijakan yang telah dibebankan organisasi pelaksana harus menyediakan fasilitas – fasilitas pendukung dalam kebijakan, sehingga dengan adanya fasilitas pendukung ini maka setiap SDM yang ada dapat memanfaatkannya dalam mendukung pelaksanaan tugas yang telah dibebankan.

Untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melakukan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu **Dian Permata Indah, SE** selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru, beliau mengatakan:

“Untuk sarana dan prasarana yang tersedia dapat dilihat saat ini di Dinas Sosial untuk turun ke lapangan menjangkau gelandangan dan pengemis ini saya rasa masih kurang memadai, ini menurut saya pribadi soalnya Dinas Sosial dalam menjangkau gelandangan dan pengemis ini sarana prasarana nya cuma mobil patroli aja dan kadang membawa satu buah mobil ambulance”.

(Wawancara: Kamis, 16 September 2021, Pukul 10.50 Wib)

Untuk mengetahui lebih dalam ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan pembinaan gelandangan dan pengemis di Pekanbaru, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak **H. Agustian, AP, M.Si** selaku Kepala Seksi Rehabilitas Sosial, dengan hasil:

”Pada saat staff kami turun ke jalan, kami cuma punya mobil buruk tu aja satu, itulah yang dipakai sehari-hari dengan staff untuk turun ke jalan kalau lagi bertugas mengintai dan menjangkau gelandangan dan pengemis, sama mobil patroli pickup itu ya. Itu saja sarana dan prasarana yang ada disini”.

(Wawancara: Kamis, 16 September 2021, Pukul 09.55 Wib)

Setelah melakukan wawancara dengan dua orang keyinforman dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas untuk mengamankan gelandangan dan pengemis, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat kekurangan sumberdaya sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih sangat kurang memadai, karena hanya tersedia dua buah mobil yang sudah tidak layak digunakan oleh staff rehabilitas sosial untuk menangani gelandangan dan pengemis.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama dengan Bapak **Zainal Arifin, SE** selaku staff rehabilitas sosial, yaitu:

“Fasilitas yang digunakan ya mobil dan mobil patroli ya cuma itu saja, itu kami dalam menertibkan gelandangan dan pengemis nya yang sedang dijalan itu kami bekerja sama dengan Satpol PP. Kami kan dari Dinas Sosial ini tidak dilengkapi fasilitas lain seperti Tongkat T, atau perisai, jadi kami kalau gelandangan pengemis itu memberontak melawan membawa pisau kami jadi sanksi juga, karena mereka ini tergolong anarkis juga. Setelah dijaring mereka ini, barulah dibawa ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk dilakukan pembinaan mentalnya”.

(Wawancara: Kamis, 16 September 2021, Pukul 11.30 Wib)

Berdasarkan wawancara diatas yang dilakukan peneliti mengenai indikator sumber daya yang terdiri dari dua sub indikator, yaitu sub indikator ketersediaan staff pelaksana yang cukup untuk melaksanakan program sebagai sumber daya manusia dan sub indikator tersedianya fasilitas (sarana dan

prasarana) peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah mengerahkan staff pelaksana dengan jumlah yang memadai untuk melakukan pengintaian kepada gelandangan dan pengemis yang ada dijalanan, namun Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih mengalami keterbatasan dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana yang seharusnya sangat berperan penting sebagai alat pendukung untuk tercapainya program pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

Analisis peneliti mengenai indikator sumber daya, bahwa sumber daya yang tersedia di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sangat penting pengaruhnya terhadap pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis. Berdasarkan temuan peneliti dalam penelitian Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis belum merata. Secara kualitas dan kuantitas staff yang tersedia bertugas untuk melakukan penjangkauan terhadap gelandangan dan pengemis yang sedang berada dijalanan sudah baik. Sumber daya manusia yang cukup harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung jalannya program pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih kekurangan fasilitas atau

sarana dan prasarana untuk melaksanakan proses pemantauan gelandangan pengemis yang sedang berada di jalanan. Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya memiliki dua buah mobil sebagai sarana dan prasarana, satu diantaranya sudah tidak layak untuk digunakan oleh petugas ketika akan melakukan patroli dan pemantauan kepada gelandangan dan pengemis yang berada di seluruh titik penjuru Kota Pekanbaru. Tetapi dengan keterbatasan ini, Dinas Sosial Kota Pekanbaru tetap melaksanakan tugasnya sebisa mungkin dengan apa yang mereka miliki agar dapat meminimalisis jumlah gelandangan dan pengemis sehingga terciptanya ketertiban di Kota Pekanbaru.

3. Disposisi (Sikap)

Disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan. Dalam penelitian ini, untuk tercapainya pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, para pelaksana kebijakan yang dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru tak hanya dituntut untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya, melainkan juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam indikator Disposisi (sikap) peneliti akan melakukan wawancara dengan Informan yaitu gelandangan pengemis dan Keyinforman dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Peneliti melakukan wawancara menggunakan pedoman yaitu berdasarkan sub indikator pemahaman pelaksana kebijakan terhadap pelaksanaan program, dan sub indikator komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis pelaksana guna mencapai tujuan.

a. Pemahaman Terhadap Program Pembinaan Yang Akan dilakukan.

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Staff Dinas Sosial Kota pekanbaru dalam menjalankan tugas untuk membina gelandangan dan pengemis, maka peneliti melakukan wawancara dengan Ibu **Dian Permata Indah, SE** selaku kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru, beliau memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Pembinaan gelandangan dan pengemis ini kan penangannya memang dari kita langsung ni, kita yang langsung turun lapangan turun kejalan untuk menjangkau mereka di jalanan sana dengan bantuan Satpol PP juga pastinya, yang kemudian mereka ini kita bawa ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang kemudian kita lakukan pendataan untuk mereka ini, jadi semuanya dari kita jadi menurut saya kita disini sudah paham lah ya langkah-langkah dan tindakan-tindakan apa yang perlu kami lakukan dalam menjalankan tugas ini, kita punya staf yang bersama-sama melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan”.
(Wawancara: Kamis, 16 September 2021, Pukul 10.50 Wib)

Sebelumnya peneliti sudah melakukan wawancara terlebih dahulu kepada Bapak **H. Agustian, AP, M.Si** selaku Kepala Seksi Rehabilitas Sosial untuk mengetahui lebih detail bagaimana pemahaman staff Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas, sebagai berikut:

“Kan sudah ada arahan dari atasan, jadi saya rasa kami semua sudah paham apa saja yang akan kami lakukan dalam membina gelandangan dan pengemis di sini,tahap pembinaan di dinsos itu dilakukan upaya menekan pertumbuhannya dulu, baru kemudian dilakukan upaya pencegahan dengan cara penertiban dan penyuluha, baru kemudian sampai di tahap rehabilitasi. Setiap ada gelandangan yang dijangkau maka akan langsung kami lakukan pembinaan kepada mereka, pembinaannya berupa edukasi, sosialisasi terhadap Peraturan kepada gelandangan dan pengemis bahwa mereka tidak boleh menggelandang, kemudian nanti di assessment mereka itu oleh kita, apa kepentingan dia menggelandang mengemis begitu, apa kebutuhan dia, misalnya kalau sakit gelandangan dan pengemis ini ya kita bawa dia ke dokter, misalnya kalau dia sakit jiwa ya kita rujuk dia ke rumah sakit jiwa, atau kalau

sakitnya parah, kita rujuk mereka ke Rumah sakit umum, itulah dia rehabilitas yang merupakan bagian dari pembinaan”.

(Wawancara: Kamis, 16 September 2021, Pukul 09.55 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan dua orang Keyinforman dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dari jawaban responden diatas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis ini sudah dilakukan secara baik, melalui pengarahan yang dilakukan oleh Kepala Seksi terhadap staff sebelum menjalankan tugasnya untuk menjangkau dan membina gelandangan dan pengemis tersebut.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pembinaan gelandangan dan pengemis saat terjaring oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, maka peneliti melakukan wawancara dengan **Agus** yang merupakan gelandangan dan pengemis yang sedang melakukan aktivitasnya, beliau menjelaskan:

“Saya sudah empat kali dibawak oleh Dinas Sosial ke kantor, dah berkali kali dibawa tapi mereka tetap baik sikapnya dengan keadaan saya yang cacat fisik ni, saya disitu dikasih arahan untuk tidak menggelandang dijalan lagi, diberi makanan, diceramahin, kemudian saya dipulangkan lagi.”

(Wawancara: Jumat, 27 Agustus 2021, Pukul 10.40 Wib)

Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan yang sama kepada Bapak

Zainal Arifin, SE yang merupakan Staff Rehabilitas Sosial, sebagai berikut:

“Iya kita bina lah dia disini, pembinaannya pembinaan fisik saja seperti kami ajak dia bangun pagi untuk olahraga pagi, lari pagi untuk kebugaran dia. Kalau untuk pembinaan keterampilan tahun ini tidak ada karena dananya tidak ada, untuk tahun kemaren ada pembinaan sol sepatu. Tadi kami baru mengamankan dua orang gelandangan dan pengemis pada jam 7 pagi tadi di simpang tabek gadang, masih pagi dia sudah dapat uang 120 ribu.

(Wawancara: Kamis, 16 September 2021, Pukul 11.30 Wib)

Berdasarkan kutipan wawancara dengan informan dan keyinformant diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru belum bisa terlaksana secara maksimal, karena program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru masih terbatas dan belum beragam. Pembinaan yang diterima oleh gelandangan dan pengemis ini masih pembinaan dasar yaitu hanya dalam bentuk pembinaan fisik saja. Pembinaan sangat berperan untuk menjadikan seseorang yang khususnya dalam penelitian ini yaitu gelandangan dan pengemis untuk mampu menjadi seseorang yang lebih mandiri dan sejahtera.

Dalam wawancara diatas peneliti melihat pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum bisa berjalan secara maksimal, karena gelandangan pengemis yang mengalami kecacatan fisik hanya bisa menerima pembinaan yang masih bersifat dasar saja sedangkan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan gelandangan dan pengemis mempunyai kewajiban untuk mengirimkan atau memberi rujukan terhadap gelandangan dan pengemis yang mempunyai keterbatasan fisik atau disabilitas ke dalam panti disabilitas.

b. Komitmen, Kejujuran, Sikap Demokratis Pelaksana Guna Mencapai Tujuan

Untuk mengetahui sub indikator diatas, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak **H. Agustian, AP, M.Si** yang merupakan Kepala Seksi Rehabilitas Sosial, beliau memaparkan jawaban:

*“Dinas Sosial dalam melakukan tugas khususnya dalam menangani gelandangan dan pengemis berusaha komitmen, kami berusaha solid antar tim. Jika ada yang terjaring tu, kami ajak mereka itu sharing, kita cari taulah permasalahan nya tu tadi, kami tanya dia punya KTP atau tidak, kalau misalnya tidak punya Ktp kami uruslah, begitu saja.
(Wawancara: Kamis, 16 September 2021, Pukul 09.55 Wib)*

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak **Zainal Arifin, SE** staff rehabilitas sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru:

*“Bagaimanapun susah nya mereka ini kami amankan, kami tetap berusaha semaksimal mungkin, walaupun kami tau saat mereka lihat kami datang tu mereka pada langsung kabur, belum lagi terkadang kami di kibulin oleh mereka itu, tapi yang menjadi tugas tetaplah bertugas, sudah jadi kewajiban kami walaupun jumlah mereka ni tak berkurang, karena gelandangan inilah permasalahan yang tak akan pernah tuntas, tugas kami hanya bisa mendegradasi saja”
(Wawancara: Kamis, 16 September 2021, Pukul 11.30 Wib)*

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan dua orang keyinforman Kepala Seksi Rehabilitas Sosial dan Staff rehabilitas sosial, peneliti memahami bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru tetap menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya untuk melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, hanya saja gelandangan dan pengemis ini tidak pernah merasakan efek jera.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang peneliti lakukan dalam penelitian Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya untuk membina gelandangan dan pengemis sudah berupaya sebaik mungkin dengan cara membangun rasa solidaritas antar sesama petugas untuk

mencapai keberhasilan program pembinaan gelandangan dan pengemis yang sesuai dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.

Analisis peneliti mengenai indikator disposisi yakni berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada Key informan dan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti maka peneliti berkesimpulan bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial yang didalamnya termuat mengenai pembinaan kepada gelandangan dan pengemis ini harus dilakukan secara intens. Jika pembinaan gelandangan pengemis belum bisa terlaksana dengan baik maka mengakibatkan mereka akan kembali menggelandang ke jalanan lagi, hal ini sesuai dengan hasil wawancara informan yang mengatakan sudah empat kali terjaring razia namun tetap kembali menggelandang dan mengemis. Penanaman bakat dan skill melalui pembinaan keterampilan seharusnya bisa dilakukan agar bisa menjadi bekal untuk gelandangan dan pengemis tersebut apabila mereka kembali kepada masyarakat mereka bisa mendapat peluang yang sama untuk mengembangkan usaha atau mendapatkan pendapatan dan penghasilan yang layak.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru diketahui tetap bertanggung jawab penuh dalam melakukan tugasnya untuk menangani gelandangan dan pengemis, diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru tetap melakukan pendekatan kepada gelandangan pengemis ini yang kemudian mencari akar permasalahan

mereka, dan mencari tahu apa kebutuhan mereka walaupun gelandangan pengemis yang terjaring orangnya itu-itu saja.

4. Struktur Birokrasi

Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik yang terakhir menurut George C Edward III yaitu merupakan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang dimaksud adalah suatu bentuk kerjasama antar banyak orang untuk menjalankan kebijakan.

Dalam penelitian Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, tentunya Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus membuat SOP atau aktivitas terencana rutin dalam melaksanakan kegiatan untuk membina gelandangan dan pengemis yang sudah terjaring dan melakukan pembagian tugas kerja untuk mempermudah pelaksanaan program. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka peneliti melakukan wawancara kepada informan dan keyinforman berdasarkan sub indikator:

a. **Membuat SOP Atau Aktivitas Terencana Rutin Dalam Melaksanakan Kegiatan Pembinaan.**

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu **Dian Permata Indah, SE.** Beliau merupakan Kepala Bidang Rehabilitas Sosial, beliau menjelaskan:

“Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah punya ya SOP dalam melakukan pembinaan gelandangan dan pengemis ni, salah satu acuan Dinas yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019, itu sudah tertera tu apa saja yang menjadi kewenangan dari Dinas Sosial, dari situ acuan kami. Kalau jadwal rutin pembinaan gelandangan pengemis ini kita lakukan setiap hari disini, kalau ada ketemu mereka tu saat sampai disini kita bina langsung, begitu lah sehari-harinya. Kalau untuk jadwal turun ke jalan itu biasanya kami setiap hari selasa, kamis, dan jumat jadwalnya”
(Wawancara: Kamis, 16 September 2021, Pukul 10.50 Wib)

Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut terkait aktivitas terencana rutin di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, peneliti melakukan wawancara bersama Bapak

H. Agustian, AP, M.Si selaku Kepala Seksi Rehabilitas Sosial, yaitu:

“Jadwal turun ke jalan itu selalu kami lakukan, setiap minggu itu biasanya pasti ada kami turun ke lapangan. Tadi jam 7 pagi hari ini tadi kami baru beres keliling, dah dapat 2 orang buta menggelandang. Mereka itu sudah hafal tu kapan aja kami datang udah tau dia, jadi mereka udah sembunyi duluan kadang. Kalau untuk pembinaannya disini setiap hari, itu setiap pagi di bina, dikasih pandangan lah kepada mereka ini, itu selama 7 hari di bina disini. Standar pelayanan minimal di tingkat kota ni memang diluar panti, kalau untuk yang didalam panti tu kewenangan dari Dinas tingkat Provinsi”

(Wawancara: Kamis, 16 September 2021, Pukul 09.55)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dua orang keyinforman dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, menurut pemahaman yang bisa peneliti simpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya untuk membina gelandangan dan pengemis ini sudah cukup sesuai dan sudah dilakukan dengan SOP yang telah ditetapkan, meskipun upaya-upaya yang sudah dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih belum bisa berhasil untuk menekan keberadaan gelandangan dan pengemis ini.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan hal yang sama dengan Ibu **Herni Hailis** yaitu gelandangan dan pengemis, ia mengatakan:

“Saya Alhamdulillah kan belum pernah ketangkap sejak 4 bulan yang lalu saya duduk disini. Biasanya hari dinas dia datang kesini kalau tak salah saya hari rabu, hari sabtu, dan kalau tak salah hari senin, kemarin sore aja baru datang kesini bawa mobil ambulance yang bergambar indomaret, kalau sudah diingatkan disuruh untuk pulang kerumah ya kita pulang aja.”

(Wawancara: Jumat, 27 Agustus 2021, Pukul 11.02 Wib)

Dari wawancara peneliti dengan informan gelandangan dan pengemis, dapat diketahui juga bahwa saat Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan penjangkauan gelandangan dan pengemis di jalanan, tidak semua gelandangan dan pengemis yang terjaring razia ini dibawa ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan, akibatnya beberapa gelandangan dan pengemis yang terjaring razia ini tidak bisa mengikuti kegiatan bimbingan sosial, pelatihan, dan pemberian bantuan kepada gelandangan dan pengemis. Artinya masih ada gelandangan dan pengemis yang belum pernah sama sekali merasakan dan menerima manfaat dari pembinaan yang harusnya dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru meskipun sudah empat bulan lamanya beraktifitas sebagai gelandangan dan pengemis.

Setelah melakukan observasi lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa Petugas Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Kemudian Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga mempunyai jadwal aktivitas terencana rutin yang intens yaitu setiap harinya dilakukan pembinaan gelandangan dan pengemis. Untuk jadwal turun lapangan menjangkau gelandangan dan pengemis yang ada di jalanan, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai jadwal tiga kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat.

b. Pembagian Tugas Kerja Untuk Mempermudah Pelaksanaan Program Pembinaan.

Pembagian tugas kerja merupakan pembagian pelaksanaan tugas sehingga petugas yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan beban kerja yang sudah dilimpahkan kepadanya masing-

masing. Pembagian tugas kerja ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepada setiap Sumber daya manusia yang dimiliki.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak **H. Agustian, AP, M.Si** selaku Kepala Seksi Rehabilitas Sosial, dengan hasil wawancara:

“Dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis ini, dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 sudah tertera bahwa Penertiban itu dilakukan oleh Satpol PP, kemudian pembinaannya dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Namun saat turun ke jalan, Dinas Sosial juga ikut turut membantu Satpol PP dalam mengamankan gelandangan pengemis ini, namun ada juga timnya dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru saja, itu kami koordinasikan saja”

(Wawancara: Kamis, 16 September 2021, Pukul 09.55)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu **Dian Permata Indah, SE** yaitu Kepala Bidang Rehabilitas Sosial, beliau memaparkan jawaban:

“Saat bertugas dilapangan itu kami berdampingan dengan Satpol PP saja, kemudian pembinaan gelandangan pengemis ini namanya pemenuhan kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis, jadi saat kita tau kebutuhan dia apa, misalnya dia harus dibawa ke panti sosial untuk dibina, nah itu kita terhubung dengan Dinas Sosial Provinsi karena pembinaan kedalam panti itu merupakan kewenangan dari Dinas Sosial provinsi, kemudian stakeholder yang terlibat dalam perda ini Discapil, karena pembinaan gelandangan dan pengemis ini ada fasilitas pembuatan NIK, kemudian Dinas Kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar mereka”.

(Wawancara: Kamis, 16 September 2021, Pukul 10.50)

Peneliti juga melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil yang lebih detail dan lebih mendalam dengan menggunakan pertanyaan yang sama kepada Staff rehabilitas sosial, yaitu Bapak **Zainal Arifin, SE** ia menyatakan:

“Saya ini staff yang bertugas ya untuk membina gelandangan dan pengemis ini, kita berbagi tugas biar mudah melakukan tugas ini biar tertata juga, jumlah saya dan rombongan saya itu ada delapan belas orang. Nama nya adalah Tim Satgas PPKS (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial). Rombongan ini dibagi dua, sembilan orang bertugas piket pagi, sembilan orang lagi tugas piket sore sampai malam. Jadi kami ada terus di Dinas Sosial”

(Wawancara: Kamis, 16 September 2021, Pukul 11.30)

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan saat turun lapangan, peneliti berkesimpulan bahwa pembagian tugas kerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah terkoordinir dengan baik yang dapat dilihat bahwa Satgas PPKS Dinas Sosial Kota Pekanbaru membagi tugas mereka menjadi dua shift yaitu piket pagi dan piket sore. Dinas Sosial Kota Pekanbaru beserta berbagai sub bagian yang terstruktur didalamnya saling bekerja sama dan bersinergi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang telah tersusun dalam program pembinaan untuk menangani dan mengatasi gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Pekanbaru.

Dalam melakukan pembinaan gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial dalam strukturnya berkoordinasi dengan beberapa Dinas terkait, salah satunya koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil untuk memenuhi jalannya pembinaan dalam bidang fasilitas pembuatan KTP, namun dalam praktiknya koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum bisa terlaksana secara maksimal, karena dalam penelitian yang peneliti lakukan masih banyak gelandangan pengemis yang belum mempunyai KTP Kota Pekanbaru namun sampai sekarang mereka yang sudah

pernah terjaring belum pernah diberikan akses untuk pembuatan KTP sebagai bentuk program pembinaan.

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Dalam melakukan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, tentunya Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengalami kendala dan hambatan-hambatan dalam melakukan program pembinaan tersebut, adapun beberapa hambatan yang dialami Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu:

1. Pada saat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bertugas untuk turun lapangan guna meninjau dan mengintai keberadaan gelandangan dan pengemis ini, beberapa gelandangan dan pengemis melakukan pemberontakan dan bersembunyi agar tidak tertangkap oleh petugas yang akan mengamankan mereka.
2. Dukungan masyarakat pada kebijakan ini masih kurang dan kebanyakan masyarakat belum memahami dengan jelas tujuan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Kurangnya dukungan dari masyarakat dapat dilihat dari beberapa masyarakat masih saja memberikan uang kepada gelandangan di jalan. Kurangnya dukungan ini mengakibatkan pelaksanaan kebijakan untuk membina gelandangan dan pengemis ini belum maksimal.

3. Sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan gelandangan dan pengemis sangat terbatas sehingga kemampuan untuk menangani gelandangan dan pengemis sulit untuk dilakukan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dilapangan dapat diketahui bahwa upaya pembinaan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru belum bisa dikatakan maksimal secara keseluruhan. Hal ini dapat terlihat bahwa belum beragamnya program pembinaan yang akan diterima oleh gelandangan dan pengemis, pembinaan yang diberikan hanya dalam bentuk pembinaan fisik dan pada tahun 2021 tidak tersedia pembinaan keterampilan. Kemudian pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dinilai belum merata karena masih ada gelandangan dan pengemis yang belum pernah sama sekali mendapatkan pembinaan oleh dinas terkait.

Selanjutnya informasi yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru kepada masyarakat mengenai kebijakan tentang adanya kebijakan yang melarang masyarakat agar tidak memberi uang kepada gelandangan di jalan belum merata kepada seluruh masyarakat, pentingnya informasi ini disampaikan ujuannya agar kebijakan yang telah dikeluarkan itu dapat diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan dan mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu:

1. Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru diharapkan bisa dilakukan secara menyeluruh, karena informasi mengenai kebijakan ini belum sampai kepada seluruh lapisan masyarakat maupun kepada para gelandangan yang ada di kota Pekanbaru.
2. Dinas Sosial dan Pemakaman Pekanbaru Kota Pekanbaru diharapkan untuk bisa memberikan pembinaan keterampilan yang serius kepada gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru karena pemberian materi pembinaan keterampilan merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru
3. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru harus lebih meningkatkan kualitas sumber daya, khususnya pada ketersediaan sarana dan prasarana yang akan digunakan ketika akan membina gelandangan dan pengemis agar pelaksanaan program bisa berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solihin. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Akbar, S.P dan H. Usman. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Asmawi, M. 2002. *Persoalan Kemiskinan Dalam Orientasi Kebijaksanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Majalah Ilmiah PDP Unpad Prakasa
- Buku Pedoman Penulisan Usuluan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa Edisi Revisi. 2013. Pekanbaru UIR Press
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Efendi, Noer. 1993. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Hasibuan, Melayu. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Iman. 2009. *Penanganan Keterlantaran Gelandangan Psicotik di Luar Panti*. Yogyakarta: Citra Media 2009
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (public policy)*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Kuswana, Dadang. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Perss
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Depok: PT Raja Grafindo
- Parlan, Supardi. 1984. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Sinar Harapan Obor
- Pasalong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Saydam, Gouzali. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management)*. Jakarta: Djambatan
- Siagian, Sondang P. 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara

- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Kencana Inu. 2018. *Sistem Administrasi negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat: Moestopo Beragama Pers
- Terri, George R dan Rue, Leslie W. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Thoha, Miftah. 1989. *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: CV Rajawali
- Widodo, Nurdin. 2012. *Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Pada Panti Sosial: Pembinaan Lanjut (After Care Services) Pasca Rrehabilitas Sosial 2012*. Jakarta: P3KS Press
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Caps
- Yussa, Hendry Andry. 2015. *Perilaku Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh

Referensi Jurnal:

- Ade Fadillah. (2017). Fenomena Pengemis Di Kota Langsa (Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pengemis). Vol. 2 No.2 Oktober 2017
- Andrio Purnama & Febri Yuliani. (2015). Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Jurnal Administrasi Negara. Volume 2 Nomor 1
- Chairika Nasution & Husni Thamrin. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan. Jurnal Administrasi Publik. Vol 4; No 2; Hal 105-119

- Dia Meirina Suri. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penertiban Dan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 3, No. 1 Hal. 89-101
- Ester Meilin Tobing. (2017). Kinerja Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Menangani Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 4 Nomor 1
- Hendy Setiawan. (2020). Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban Dan Rural Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vol. 6 No. 2 Hal 361-372
- Mila Khasanah. (Edisi I Januari – Juni 2020). Penegakan Hukum Pemerintahan Tentang Ketertiban Sosial (Gelandangan Dan Pengemis) Di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 7: Edisi 1 Januari-Juni 2020
- Sakman. (2016). Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar). *Jurnal Ppkn*. Volume 11 Nomor 2. Edisi: Oktober 2016
- Yuki Deli A.M. (2014). Efektivitas Pembinaan Dan Pelatihan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Negara*. Volume 2 Nomor 1

Dokumen:

- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru
- Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Lampiran 11 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 3001/A_UIR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Selvina Rianti
 Npm : 177110056
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
 Persentase Plagiasi : 27 % (120 Halaman)
 Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

Format Kami,
 Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
 NPK. 970702230

Lampiran 12 : Sertifikat Baca Alquran

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 LEMBAGA DAKWAH ISLAM KAMPUS (LDIK)

SERTIFIKAT
 Nomor Registrasi : 14230/LDIK-UIR/2021

Berdasarkan
 Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 002/UJR/PR/2021
 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 525/UJR/KPTS/2018

Lembaga Dakwah Islam Kampus (LDIK) Universitas Islam Riau menyatakan bahwa :

SELVINA RIANTI
 Nomor Pokok Mahasiswa : 177110056

Lahir di Bengkalis Tanggal Satu Juni Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan
 Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

LULUS Tes Baca Al-Qur'an Dengan Predikat **Kurang Baik**

Pekanbaru, 21 Oktober 2021


Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si
 NIDN. 1013047704


 Diuji Pada : 18.10.21